

# **PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK BERBASIS**

## **MASYARAKAT DI KABUPATEN MALANG**

( Studi Implentasi PP No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Prinsip 3R di TPST  
Desa Mulyoagung)

### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

**PUTRI MARTIANDARI**

**145030500111007**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

**MALANG**

**2018**

## MOTTO

**“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.” (Aldus Huxley)**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat di  
Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP No. 81 Tahun  
2012 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah  
Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Prinsip 3R di  
TPST Desa Mulyoagung)

Disusun oleh : Putri Martiandari

NIM : 145030500111007

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Ilmu Administrasi Pemerintahan

Malang, 3 Mei 2018  
**Komisi Pembimbing,**



**Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS**  
**NIP. 19691002 199802 1 001**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

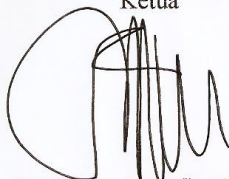
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Mei 2018  
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB  
Skripsi Atas Nama : Putri Martiandari  
Judul : Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



**Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS**  
**NIP. 19691002 199802 1 001**

Anggota



**Drs. Heru Ribawanto, MS**

**NIP. 19520911197903 1 002**

Anggota



**Dr. Tjahjanulin Domai, MS**

**NIP. 19531222198010 1 001**

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 3 Mei 2018



Nama : Putri Martiandari  
NIM : 145030500111007

## RINGKASAN

Putri Martiandari, 2018. **Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Prinsip 3R di TPST Desa Mulyoagung)**, Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS. 120 Halaman + xv

Berbagai masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satu penyebabnya adalah jumlah sampah yang terus meningkat yang merupakan persoalan nasional dan sulit menemukan pemecahan optimal. Penumpukkan sampah yang terus melaju pesat setiap tahunnya merupakan cerminan bahwa permasalahan sampah membutuhkan penanganan yang tepat dan akurat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang. Studi penelitian adalah Program TPST Berbasis Masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Program ini menekankan kepada pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah, atau kawasan seperti RT atau RW dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) Berbasis Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) implementasi PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R "*Reduce, Reuse, Recycle*" Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang; (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R "*Reduce, Reuse, Recycle*" Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan empat tahapan yaitu tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan operasional pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh TPST Mulyoagung Bersatu tidak mengalami kendala. Dalam aspek pendanaan, biaya operasional yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat dari hasil iuran warga dan penjualan lapak serta pupuk kompos menjadi kendala utama TPST dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam Program TPST 3R Berbasis Masyarakat sebelum proyek cukup tinggi. Akan tetapi dalam hal penyampaian aspirasi dan pendapat masih rendah.

Dalam implementasi pengelolaan sampah, agar hal ini bisa diwujudkan, perlu adanya *reward* bagi masyarakat yang melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat agar memilah sampah sejak dari sumbernya dan mempunyai niat dari dalam dirinya untuk ikut serta dalam pengurangan sampah. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kabupaten Malang





## SUMMARY

Putri Martiandari, 2018. **Community Baes Waste Management in The Poor District (implementation of Government Regulation No. 81/2012 on “3rd Community” Reduse, Reuse, Recycle management Program in Mulyoagung Village, Dau District, Malang Regency)**, Skripsi. Public Administration, Government Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Supervisor : Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS. 120 pages + xv

---

Various problems of environmental pollution that occurred in Indonesia one cause is the amount of waste continues to increase which is a national problem and difficult to find an optimal solution. The accumulation of garbage that continues to grow rapidly every year is a reflection that the waste problem requires precise and accurate handling. This research was conducted with the aim to describe Implementation of Community Based Waste Management Policy in Regency. Research study is Community Based TPST Program that exist in TPST Mulyoagung Bersatu, Dau, Malang Regency. This program emphahasizes the reduction of waste disposed by individuals, homes, or area like RT or RW with the 3R (Reduce, Reuse, Recyle) Comunity Based Method.

This research uses qualitative research type with descriptive approach which is limited by two research focus, that is (1) implementation of Government Regulation No. 81/2012 on “3rd Community” Reduse, Reuse, Recycle management Program in Mulyoagung Village, Dau, Malang Regency; (2) the supporting and inhibiting factors of the implementation of Government Regulation No. 81/2012 on “3rd Community” Reduse, Reuse, Recycle management Program in Mulyoagung Village, Dau, Malang Regency. Data analysis method uses is interactive data model analysis Miles, Huberman, and Saldana with four stages of data collection stage, data condensation, data presentation, and withdrawal of conclusion or verifcaton.

The results showed that the implementation of policy of Government Regulation No. 81 of 2012 on Community Based 3R TPST Mulyoagung Bersatu has been implemented in accordance with the procedures although there are some obstacles in the implementation. Based on the operation of waste management, garbage transporting by TPST Mulyoagung Bersatu does not experience any obstacles. In the funding aspect, the operational cost is high and not comparable with the revenue generated from the contribution of the villagers and the sale of stall and compost fertilizer becomes the main constraint of TPST in carrying out waste management activities. The participation of the Mulyoagung Village community in the 3R Community Based TPST program before the project is quite high. However, in terms of delivery of aspirations and opinions are still low.



In the implementation of waste management, so that this can be realized, need a reward for people to sort waste from source and have intention from within themselves to participate in waste reduction. In addition the government also needs to do counseling to the public about the importance of sorting waste.

Keyword: Policy Implementation, Waste Management. Malang Regency



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada cinta pertama dan inspirator dalam hidup saya, Bapak Drs. Rujita kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluhan kesahnyanya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi dan menjadi panutan saya, Ibu Dra. Siti Astutik. Seorang ibu yang penuh kasih sayang serta selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan dunia dan akhirat.

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Prinsip 3R di TPST Desa Mulyoagung)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc., selaku Ketua Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Universitas Brawijaya.

4. Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Drs. Heru Ribawanto, MS dan Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku penguji skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini telah selesai dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Drs. Rujita dan Ibu Dra. Siti Astutik, selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan doa dan dukungan moral serta dukungan materi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Hendro Rakhmad Gunawan dan Zayyan Nuruddin, selaku adek dan kakak kandung penulis yang selalu memberi doa dan dukungan kepada penulis selama kuliah.
9. Bapak Supadi selaku Kepala Kelompok Swadaya Masyarakat TPST Mulyoagung Bersatu, Ibu Ratna selaku Staff Administrasi TPST Mulyoagung Bersatu, dan beberapa pegawai TPST Mulyoagung Bersatu Kabupaten Malang.
10. Sahabatku Rosifatul Aqliyah dan Rizki Nurillahi Al Arief yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

11. Sahabatku HAPPS “Hilda Garina, Ade Febianty, Prilla Cremona, dan Suci Dwi Astuti” yang selalu memberi dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman Pondok Pesantren Annur III Murah Banyu Bululawang Malang, Ulya Munzilatul Quswha, Faeq, Nurul Hidayati, Arini Su’aidah, dan Irlimitha yang selalu membantu penulis menyelesaikan studinya.
13. Temanku Nadya Pangestika Sarah Gunawan, Maria Ulfa, dan Refi Fadila yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman mahasiswa Minat Ilmu administrasi Pemerintahan Universitas Brawijaya angkatan 2014 yang selalu membantu penulis menyelesaikan studinya.
15. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 3 Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN KARYA .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xx</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	11
1. Kontribusi Akademis.....	11
2. Kontribusi Praktis .....	12
E. Sistematika penulisan.....	13

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kebijakan Publik .....	15
1. Pengertian Kebijakan .....	15
2. Pengertian Kebijakan Publik .....	16
3. Jenis-jenis Kebijakan Publik .....	17
4. Tahap-tahap Kebijakan Publik .....	18
B. Implementasi Kebijakan.....	21
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	21
2. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	21
C. Sampah .....	27

1. Pengertian Sampah .....	27
2. Jenis-jenis Sampah .....	27
3. Prinsip Pengelolaan Sampah .....	31
4. Cara Pengelolaan Sampah .....	32
5. Permasalahan Sampah .....	33
D. Program TPST 3R Berbasis Masyarakat .....	34
1. Tujuan .....	35
2. Tindakan .....	36
3. Prosedur .....	40
4. Keberlanjutan Program .....	41
E. Pemberdayaan Masyarakat .....	42
1. Pemberdayaan Masyarakat .....	42
2. Tujuan Pemberdayaan .....	45
3. Proses-proses Pemberdayaan.....	46
F. Kerangka Berfikir .....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian .....	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	52
D. Sumber Data.....	52
1. Data Primer.....	53
2. Data Sekunder .....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Wawancara .....	54
2. Obsevarsi .....	54
3. Dokumentasi.....	54
F. Instrumen Penelitian.....	55
1. Peneliti.....	55
2. Pedoman Wawancara .....	55
3. Perangkat Penunjang .....	55
G. Keabsahan Data.....	56
H. Analisis Data .....	57
1. Pengumpulan Data.....	57
2. Kondensasi Data .....	58
3. Penyajian Data.....	58
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi .....	58



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....	60
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	60
2. Gambaran Umum Kecamatan Dau.....	63
3. Profil TPST Mulyoagung Bersatu .....	65
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	68
1. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 Mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu .....	68
a. Kebijakan, Strategi, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat .....	68
b. Pendanaan .....	92
c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat .....	98
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu .....	103
a. Faktor Pendukung.....	103
1) Komitmen Pengurus KSM TPST Mulyoagung Bersatu dalam Mengelola Sampah.....	103
2) Sarana dalam Pengelolaan Sampah yang Memadai.....	104
b. Faktor Penghambat. ....	105
1) Biaya Operasional TPST Mulyoagung Bersatu yang Tinggi .....	105
2) Sampah dari Masyarakat yang Belum Terpilah .....	106
C. Analisis Data Fokus Penelitian .....	107
1. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 Mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu .....	107
a. Kebijakan, Strategi, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat .....	107
b. Pendanaan .....	110
c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat .....	112
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu .....	115
a. Faktor Pendukung.....	115
b. Faktor Penghambat. ....	117

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
-----------------------------	------------



**DAFTAR TABEL**

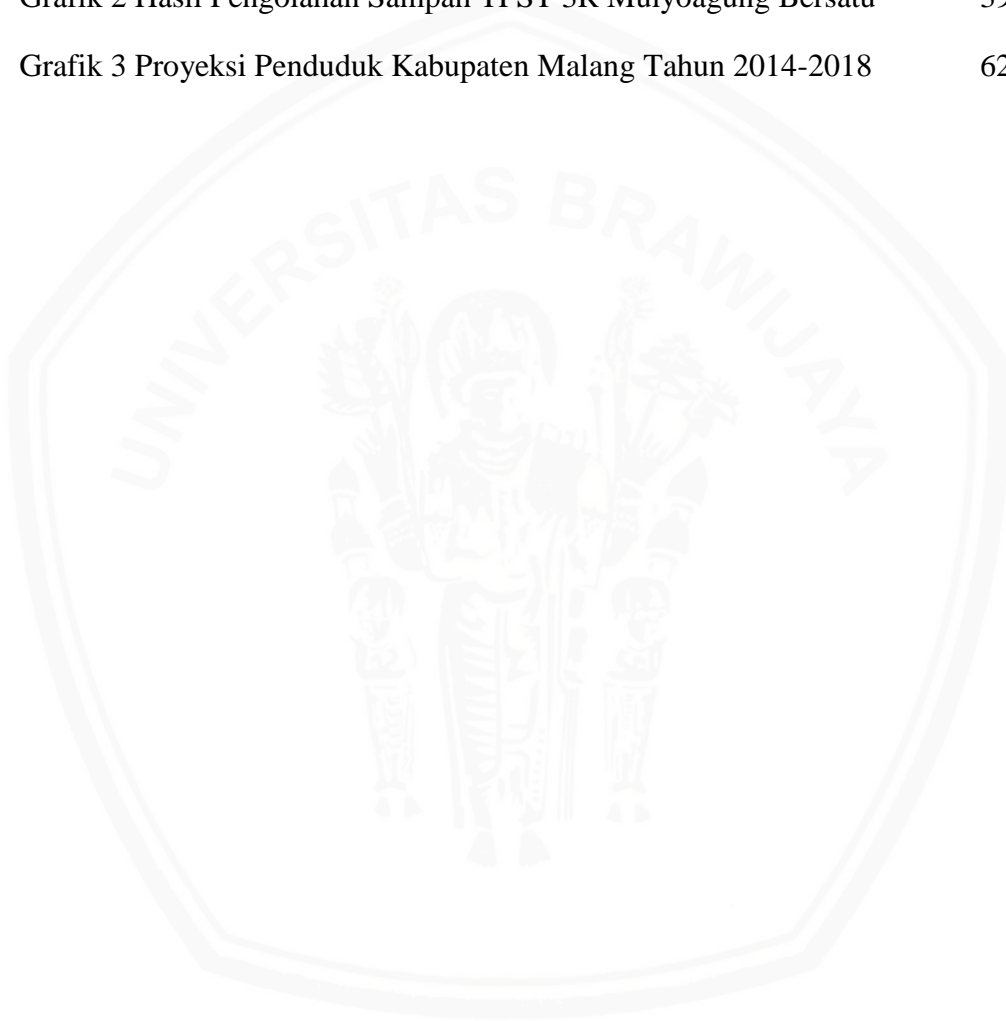
<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Infrastruktur TPST Mulyoagung	67
Tabel 2 Jadwal Pengelolaan Sampah TPST Mulyoagung Bersatu	77
Tabel 3 Sarana Pengangkut Sampah TPST Mulyoagung Bersatu	79
Tabel 4 Lokasi Pengangkutan Sampah TPST Mulyoagung Bersatu	81
Tabel 5 Penjualan Lapak TPST Mulyoagung Bersatu	93
Tabel 6 Iuran Sampah TPST Mulyoagung Bersatu	95
Tabel 7 Laporan Global Pemasukan dan Pengeluaran Rata-Rata Setiap Bulan TPST Mulyoagung Bersatu	96

## DAFTAR GAMBAR

<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Jumlah Penduduk Dunia Tahun 2017	1
Gambar 2 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Malang	2
Gambar 3 Lahan Pembuangan Sampah di Daerah Aliran Sungai Brantas Desa Mulyoagung Sebelum TPST Dibangun	5
Gambar 4 Model Direct and Indirect of Implementation	25
Gambar 5 Proses Kerja TPST Mulyoagung Bersatu	38
Gambar 6 Kerangka Berpikir	48
Gambar 7 Analisis Data Model Interaktif	59
Gambar 8 Peta Kabupaten Malang	60
Gambar 9 Struktur Organisasi TPST Mulyoagung Bersatu	68
Gambar 10 Motor pengangkut sampah	80
Gambar 11 Pemilahan Sampah TPST Mulyoagung Bersatu	82
Gambar 12 Budidaya Kolam Ikan TPST Mulyoagung Bersatu	87
Gambar 13 Pengayakan Kompos TPST Mulyoagung Bersatu	90
Gambar 14 Pengemasan Kompos TPST Mulyoagung Bersatu	91

**DAFTAR GRAFIK**

<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Grafik 1 Volume Sampah di TPST Desa Mulyoagung Tahun 2011 - 2016 (satuan m <sup>3</sup> )	6
Grafik 2 Hasil Pengolahan Sampah TPST 3R Mulyoagung Bersatu	39
Grafik 3 Proyeksi Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2014-2018	62



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

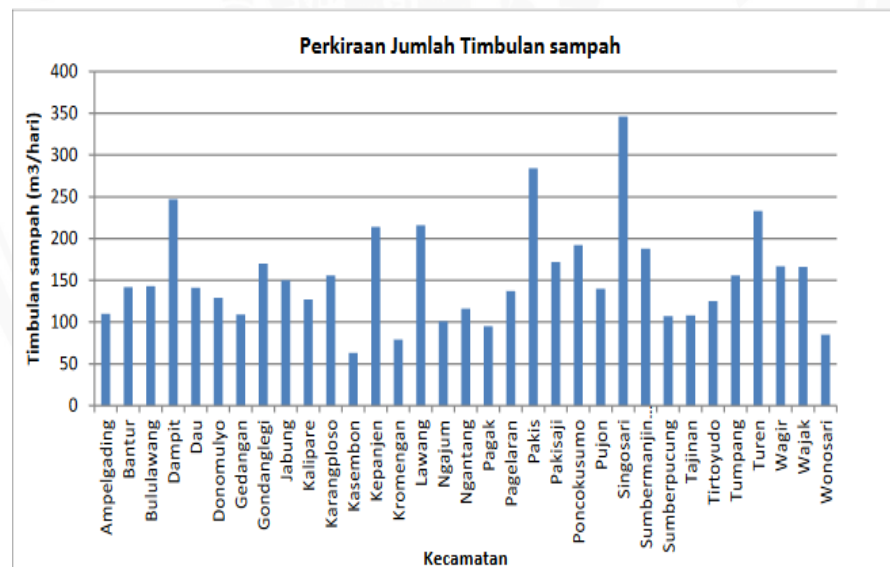
Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar urutan ke 4 setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk menghambat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan lingkungan hidup masyarakat di Indonesia.

JUMLAH PENDUDUK DUNIA 2017			
NO	NEGARA	JUMLAH PENDUDUK	%
1	 Tiongkok	1.384.950.000	18.7%
2	 India	1.311.160.000	17.7%
3	 Amerika Serikat	326.566.000	4.4%
4	 Indonesia	257.912.349	3.44%
5	 Brasil	208.286.000	2.81%
6	 Pakistan	188.925.000	2.55%
7	 Nigeria	182.202.000	2.46%
8	 Bangladesh	162.993.000	2.2%
9	 Rusia	147.112.930	1.98%
10	 Jepang	126.890.000	1.71%

**Gambar 1 Jumlah Penduduk Dunia Tahun 2017**

*Sumber: Artiket Data Indonesia "tumoutounews",2017*

Semakin bertambahnya penduduk Indonesia yang diiringi dengan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume sampah dan jenis sampah yang beragam. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap, mengurangi kesuburan tanah, menghambat sirkulasi tanah serta menghambat aliran air. Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang kurang baik berdampak buruk bagi kesehatan, sehingga peran Dinas Kebersihan sebagai lembaga pemerintahan sangat penting dalam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain peran Dinas Kebersihan, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengurangi sampah dan mengelola sampah.



**Gambar 2 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Malang**

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2016*



Jumlah timbunan sampah terangkut berdasarkan data inventarisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R yaitu sebesar 430,5 m<sup>3</sup>/hari. Berdasarkan sampah tersebut, sebesar 309,7 m<sup>3</sup>/hari sampah berhasil diolah atau sebesar 71,93%, sisanya sebesar 119,1 m<sup>3</sup>/hari atau 27,67% masih belum diolah. Sampah yang belum terolah di TPST 3R ini diangkut ke TPA untuk pengolahannya.

Berbagai masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satu penyebabnya adalah jumlah sampah yang terus meningkat yang merupakan persoalan nasional dan sulit menemukan pemecahan optimal. Penumpukkan sampah yang terus melaju pesat setiap tahunnya merupakan cerminan bahwa permasalahan sampah membutuhkan penanganan yang tepat dan akurat. Sehingga mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang optimal serta solutif mampu menjawab persoalan masalah sampah di Indonesia. Kemungkinan penyebab utama sulitnya mencapai persoalan sampah yang optimal ialah banyak dari masyarakat yang memiliki pola pikir pengelolaan sampah hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tentunya pandangan seperti masyarakat yang memiliki pola pikir pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang dengan mengandalkan keberadaan TPA ini sangat disayangkan karena jika hanya mengandalkan TPA tidak akan mampu untuk mengurangi jumlah volume penumpukkan sampah yang diproduksi oleh masyarakat. Kondisi demikian tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam rangka merealisasikan program pengelolaan

sampah yang telah diciptakan. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga memiliki tanggungjawab dalam mengelola dan mengurangi sampah.

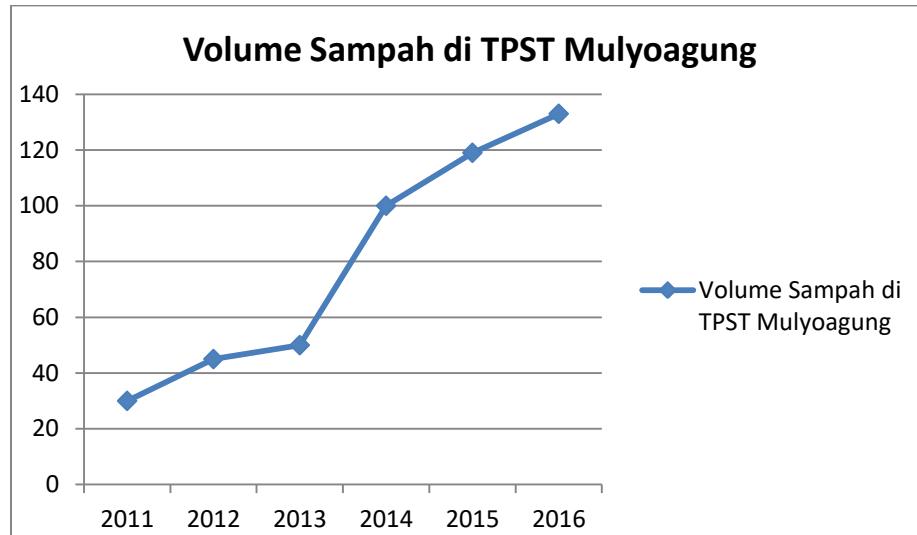
Melihat potret pengelolaan sampah di Indonesia yang memprihatinkan ini, berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan sampah yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Beberapa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia turut dilanda pencemaran lingkungan akibat permasalahan sampah. Salah satu daerah tersebut ialah Desa Mulyoagung, yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pencemaran lingkungan pada daerah tersebut terjadi di Daerah Aliran Sungai Brantas akibat lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berada di bibir sungai Brantas.



**Gambar 3 Lahan Pembuangan Sampah di Daerah Aliran Sungai Brantas Desa Mulyoagung Sebelum TPST Dibangun**

*Sumber: Dokumen TPST Mulyoagung Bersatu*

Banyaknya masyarakat yang membuang sampah di TPS yang berada di tepi Sungai Brantas menyebabkan semakin tingginya volume penumpukkan sampah, sehingga ketika hujan turun seringkali sampah-sampah ikut terbang di sungai Brantas. Kondisi tersebut tentunya berimplikasi pada terjadinya pencemaran pada air sungai Brantas.



**Grafik 1 Volume Sampah di TPST Desa Mulyoagung Tahun 2011 - 2016 (satuan m<sup>3</sup>)**

*Sumber : Dokumen TPST Mulyoagung Bersatu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa volume sampah yang masuk pada TPST Mulyoagung Bersatu ini setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini dikarenakan beberapa desa yang berada di dekat Desa Mulyoagung membuang sampah di TPST Mulyoagung. Dalam pengelolaannya TPST Mulyoagung ini memilah sampah yang masuk setiap harinya untuk segera dipilah sesuai jenis sampah yang ada yang kemudian hasilnya dapat dijual kembali dan sisa sampah yang tidak terpakai dibuang di Tempat Pembuangan Akhir.

Mencermati permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkup wilayah administrasinya, Pemerintah Kabupaten Malang mengimplementasikan program Pengelolaan Sampah 3R “*Reduce, Reuse, Recycle*” Berbasis Masyarakat, sebagai

solusi dalam mengatasi pencemaran air Sungai Brantas akibat permasalahan sampah. Program ini merupakan hasil karya Kementrian Pekerjaan Umum sebagai inovasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Program ini diharapkan mampu menjawab persoalan masalah sampah serta terobosan baru melalui keterlibatan peranaktif masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Kegiatan mengurangi dan menangani sampah terkait erat dengan konsep 3R, yang terdiri atas:

1. *Reduce* (mengurangi timbulan sampah), yaitu mengurangi kegiatan konsumsi yang menyebabkan timbulan sampah.
2. *Reuse* (menggunakan kembali bahan yang berpotensi menimbulkan sampah), yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain.
3. *Recycle* (mendaur ulang sampah), yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Persiapan dalam rangka implementasi program Pengelolaan Sampah 3R “*Reduce, Reuse, Recycle*” Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung, difasilitasi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui perannya sebagai pendamping serta pembina. Dimana instansi tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Pekerjaan Umum di Kabupaten Malang. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Mulyoagung mengusulkan untuk dibangun Tempat Pengelolaan Sampah

Terpadu (TPST) sebagai bentuk usaha pengelolaan sampah agar memiliki nilai jual dan bermanfaat. Usulan ini direspon positif oleh Masyarakat dan Pemerintah setempat khususnya Desa Mulyoagung dan mulai tahun 2008 Desa Mulyoagung mendapatkan hibah lahan bahwa sampah harus dikelola. Tahun 2009 dimulai dengan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) seluas 2000 m<sup>3</sup>. TPS yang berdiri pada tahun 2010 ini mulai berani dioperasikan oleh masyarakat pada akhir Desember 2010.

Ketentuan mengenai implementasi program Pengelolaan Sampah 3R "*Reduce, Reuse, Recycle*" Berbasis Masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempersiapkan lokasi TPS-3R Berbasis Masyarakat dengan merelokasi TPS-3R yang dahulu berada di tepi Sungai Brantas ke suatu lahan milik Desa Mulyoagung yang selanjutnya dikenal sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung Bersatu. TPST Mulyoagung Bersatu merupakan lokasi diterapkannya Program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung. Begitu pula halnya dengan wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula bahan buangan atau sampah yang dihasilkan. Tingginya aktivitas penduduk Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Maka munculnya TPST-3R Mulyoagung Bersatu berbagai masalah yang timbul



akibat adanya sampah di Desa Mulyoagung yang di antaranya permasalahan tersebut antara lain:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan khususnya Daerah Aliran Sungai Brantas yang sebelumnya dijadikan Tempat Pembuangan Akhir sampah dari Desa Mulyoagung.
2. Tidak ada penanganan terhadap sampah, yang jumlah volume sampah setiap hari semakin bertambah.
3. Banyaknya lahan yang dimiliki oleh Desa Mulyoagung yang tidak dimanfaatkan dengan baik meski jumlah pengangguran Desa Mulyoagung terbilang cukup banyak.

Proses pengelolaan sampah pada TPST Mulyoagung Bersatu masyarakat disini yaitu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menjadi pengurus TPST. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara sukarela mengurus TPST dengan maksud agar tercipta lingkungan yang bersih. KSM juga melibatkan partisipasi masyarakat lain untuk bekerja menjadi pengangkut, pemilah dan pengomposan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Dengan adanya berbagai masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana



implementasi program pengelolaan sampah 3R “Reduce,Reuse,Recycle” berbasis masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PP No. 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R “*Reduce,Reuse,Recycle*” Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PP No. 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R “*Reduce,Reuse,Recycle*” Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi PP No. 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R “*Reduce, Reuse, Recycle*” Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi PP No. 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R “*Reduce, Reuse, Recycle*” Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

### D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

#### 1. Kontribusi Akademis

##### a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperbanyak khazanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Pemerintahan atau Publik. Selain itu mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai implementasi kebijakan publik.

#### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian terutama mengenai kebijakan publik dalam implelementasi kebijakan publik khususnya tentang implementasi pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.

### 2. Kontribusi Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi atau masukan terhadap Desa Mulyoagung dalam melaksanakan program pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat sehingga program tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Serta menjadi alternatif untuk melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap program tersebut.

#### b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam bersikap dan merespon kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu program pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat agar program maupun kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini perlu dijelaskan sistematika penulisan pembahasan agar para pembaca mampu dengan mudah dan benar memahami makna yang ada dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas tentang latar belakang penelitian mengenai alasan yang mendasari peneliti untuk menganalisis implementasi program pengelolaan sampah 3R “Reduce, Reuse, Recycle” berbasis masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Selain itu pada bab ini juga berisi rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang membahas landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

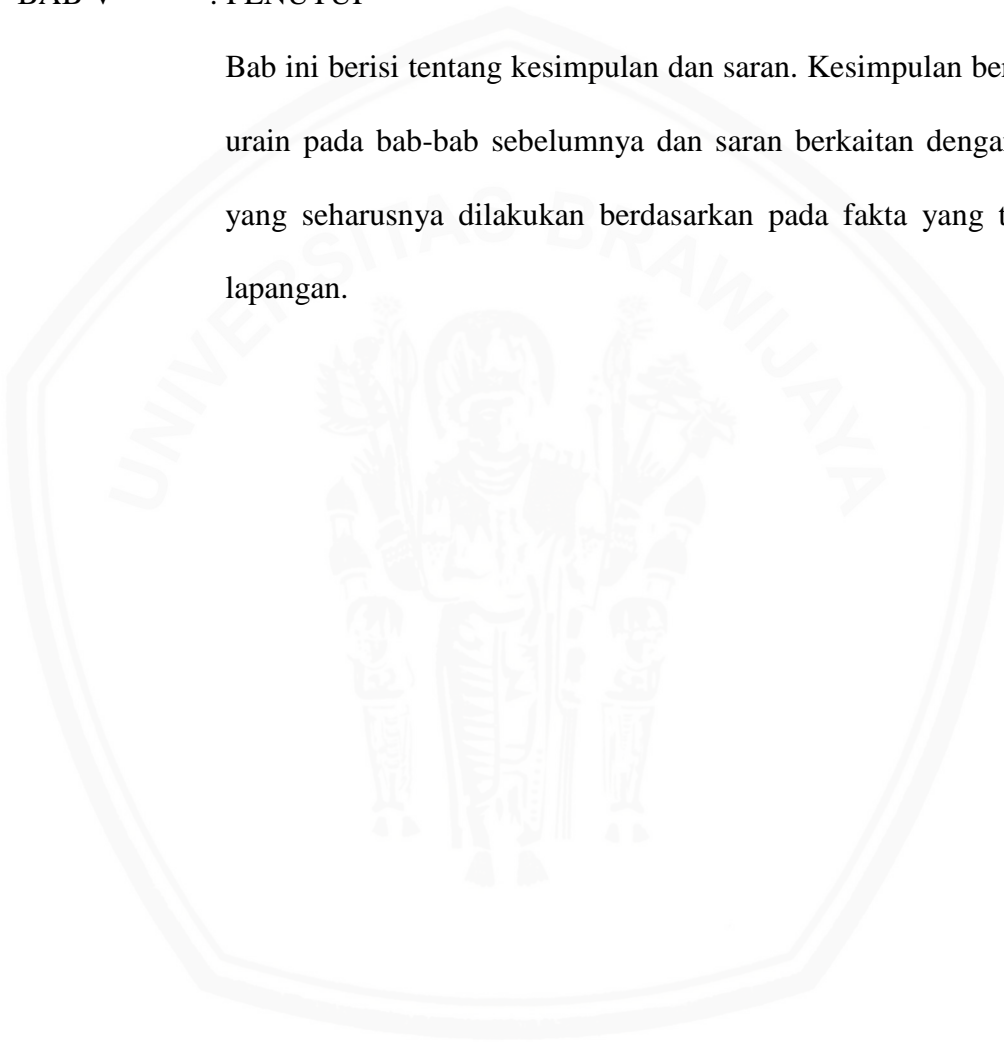
Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yang meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penyajian data, analisis data, dan hasil interpretasi analisis data yang diperoleh selama penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau “*policy*” menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Abdul Wahab (2005:3) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Anderson yang juga dikutip oleh Abdul Wahab (2005:3) kebijakan merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu dapat berupa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, luas atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (United Nations, 1975 dalam Ali

2006:4). Pengertian kebijakan mempunyai beberapa implikasi (Ekowati, 2005)

yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah
- b. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
- c. Bahwa kebijakan negara itu, baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
- d. Bahwa kebijakan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan berkenaan dengan suatu masalah yang dihadapi. Kebijakan itu dibuat oleh pemerintah, kemudian dituangkan dalam tindakan-tindakan nyata yang nantinya akan mempunyai tujuan untuk menjalin kepentingan umum semaksimal mungkin yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut William N. Dunn yang dikutip Pasolong (2008:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Di sisi lain, Anderson dalam Irfan Islamy (2007:19) mendefinisikan



kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Pengertian ini mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh instansi pemerintah. Adanya kebijakan publik sebagai alternatif pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik serta harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jadi, kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah. Permasalahan dalam masyarakat yang perlu ditangani adalah sangat luas meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan, maka diperlukan berbagai kebijakan publik yang sesuai dan terarah agar tujuannya berhasil dicapai secara efektif dan efisien. (Adisasmita, 2011:113)

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam bentuk program atau keputusan lainnya guna tercapainya tujuan dalam kepentingan masyarakat luas.

### **3. Jenis-jenis Kebijakan Publik**

Berdasarkan pendapat Ali (2006), terdapat beberapa jenis kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan distributif

Untuk mendorong aktifitas masyarakat/swasta dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat luas, maka dilakukan bentuk intervensi: *tangible benefits*, seperti memberi subsidi, transfer dana, intensif pajak, kredit lunak, izin warabala, lisensi, dan lain-lain.

b. Kebijakan *regulatory competitive*

Pemberian barang atau jasa kepada satu atau sejumlah orang secara terbatas dalam memberikan pelayanan jasa publik yang dipilih dari sejumlah calon secara kompetitif, seperti memberikan izin siaran TV, izin siaran radio swasta, izin trayek bus, penerbangan, dan lain-lain.

c. Kebijakan untuk melindungi masyarakat umum

Penetapan persyaratan/kondisi untuk kegiatan swasta tertentu, seperti peraturan upah minimum regional, pengujian kendaraan umum, penetapan tarif angkutan.

d. Kebijakan redistributif

Kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan alokasi kelayakan, hak milik, kepemilikan, atau nilai-nilai lainnya di antar kelas sosial dan kelompok sosial dalam masyarakat.

#### 4. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik

Menurut James E. Andersen, David W. Brady, dan Charles Bullock III (1987) mengembangkan model "*Policy Process as Linear Stages*" (Proses Kebijakan sebagai Tahapan-Tahapan Linier) sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah sebanyak mungkin yang akan dijadikan prioritas dalam agenda publik. Dalam penyusunan agenda sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintahan. Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat esensi, dan keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritasi pada poses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.

d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus segera diatasi sedini mungkin.

e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Evaluasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan apakah kebijakan efektif atau tidak, mengapa efektif dan mengapa tidak efektif. Tahap ini menjadi penentu suatu kebijakan bisa berjalan sesuai tujuan atau tidak. Jika suatu kebijakan tidak sesuai dengan tujuan atau terjadi masalah, maka akan dilakukan pembuatan strategi baru untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. (Nugroho, 2015:112)

## **B. Implementasi Kebijakan**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan sebuah tahapan dari kebijakan publik setelah sebelumnya adalah perumusan kebijakan yang kemudian dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Menurut Hamdi (2014:97) implementasi kebijakan berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan tersebut menghasilkan keadaan yang direncanakan. Implementasi kebijakan dapat dianggap suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2008:139) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

### **2. Model Implementasi Kebijakan**

Beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:140-161) antara lain :

- a) **Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn**

Model ini disebut model *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini dilakukan secara sengaja untuk meraih kinerja imolementasi publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Variable tersebut antara lain :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebiakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan.
- 2) Sumberdaya. Keberhasilan proses kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
- 3) Karakteristik agen pelaksana. Kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.
- 4) Sikap/kecenderungan para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi publik.
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik.

**b) Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier**

Model ini disebut *A Framework for Policy Implementation Analysis*.

Peranan penting implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variable-variable yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variable tersebut adalah:

- 1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: (a) Kesukaran-kesukaran teknis; (b) Keberagaman perilaku yang diatur; (c) Presentasi totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran; dan (d) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
- 2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat meliputi: (a) Kecermatan dan kejelasan penjenjang tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai; (b) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan; (c) Ketetapan alokasi sumber dana; (d) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana; (e) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana; (f) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang; (g) Akses formal pihak luar.
- 3) Variable-variable diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi meliputi: (a) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi; (b) Dukungan publik; (c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat; (d) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

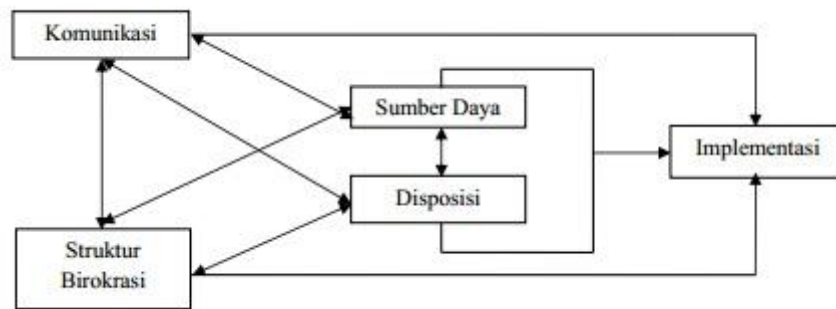


### c) Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III

Model ini disebut juga dengan Direct And Indirect Impact On Implementation. Menurut Edward III terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut antara lain :

- 1) Komunikasi. Implementasi yang efektif apabila para pembuat kebijakan mengerti apa yang akan mereka kerjakan sehingga komunikasi menjadi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Indikator dalam komunikasi adalah (a) transmisi; (b) kejelasan; (c) konsistensi.
- 2) Sumberdaya. Sumberdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu : (a) staf; (b) informasi; (c) wewenang dan (d) fasilitas.
- 3) Disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan sehingga pelaksana kebijakan harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan yang akan dilakukan. Elemen-elemen dalam disposisi antara lain : (a) Peningkatan birokrat; (b) insentif.
- 4) Stuktur birokrasi. Struktur birokrat yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Prosedurs* (SOP) yang merupakan kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.





**Gambar 4 Model *Direct and Indirect of Implementation***  
 Sumber : *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:140-161)

#### d) Model Merilee S. Grindle

Model ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle variable yang mempengaruhi kebijakan ini adalah *outcome* yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang akan diraih. Pengukuran kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu :

- 1) Dilihat dari prosesnya yaitu apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai yang diukur dengan faktor (a) dampak secara individu dan kelompok pada masyarakat. (b) tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implelementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua hal, antara lain yaitu :

- a) *Content of Policy* (isi kebijakan) meliputi: (a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi); (b) *Type of Benefits* (tipe manfaat); (c) *Extend of Change Envision* (derajat perubahan yang

ingin dicapai); (d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan); (e) *Program Implementer* (Pelaksana program); dan (f) *Resource Committed* (Sumber-sumber daya yang digunakan).

- b) *Content of policy* (Konteks Kebijakan) yang meliputi: (a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat); (b) *Intitution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa); (c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Empat model implementasi kebijakan yang telah dipaparkan tersebut, model pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang dikemukakan oleh George C. Edward III merupakan model yang paling cocok untuk digunakan dalam menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dalam penelitian ini. Empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan dalam model *Direct and Indirect Impact on Implementation* berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah. Empat faktor yang dimaksud adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan.

## **C. Sampah**

### **1. Pengertian Sampah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola sesuai prosedur yang benar. (Panji Nugroho, 2013).

Pengelolaan sampah membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir. Sampah sebagai barang yang masih bisa dimanfaatkan tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijikkan, melainkan harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang berguna lainnya. Seharusnya pengelolaan sampah harus dilakukan dengan efisien dan efektif, yaitu sebisa mungkin dekat dengan sumbernya, seperti dilingkungan RT/RW, sekolah, dan rumah tangga sehingga jumlah dapat dikurangi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sampah adalah barang-barang dari segala aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai dan dibuang serta tidak memiliki nilai tetapi sebagian orang bisa mengelola sampahnya sesuai dengan prosedur yang benar.

### **2. Jenis – jenis Sampah**

Menurut Panji Nugroho dalam buku Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair (2013), jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain :

a. Berdasarkan sumbernya

1) Sampah alam

Yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat didaur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

2) Sampah manusia

Sampah manusia (*human waste*) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyuluhan pipa.

### 3) Sampah konsumsi

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

### 4) Sampah industri

Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah (limbah industri pangan, limbah industri kimia dan bahan bangunan, limbah industri logam dan elektronika).

#### b. Berdasarkan sifatnya

##### 1) Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

##### 2) Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang

laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol, dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas.

c. Berdasarkan bentuknya

1) Sampah padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine, dan sampah cair. Dapat berupa sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.

Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi:

a) *Biodegradable*

Yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob (menggunakan udara/terbuka), atau anaerob (tidak menggunakan udara/tertutup), seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.

b) *Non-biodegradable*

Yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologis, yang dapat dibagi lagi menjadi:

- (a) *Recyclable* yaitu sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.
- (b) *Non-recyclable* yaitu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti *tetra packs* (kemasan pengganti kaleng), *carbon paper*, *thermo coal* dan lain-lain.

## 2) Sampah cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak dapat diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

- a) Limbah hitam yaitu sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya.
- b) Limbah rumah tangga seperti sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung patogen.

## 3. Prinsip Pengolahan Sampah

Berikut adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 5M (Panji Nugroho, 2013), yaitu:

1. Mengurangi ( *Reduce* )

Mengurangi penggunaan barang-barang habis pakai yang dapat menimbulkan sampah. Karena semakin banyak barang terbuang maka akan semakin banyak sampah.

2. Menggunakan kembali ( *Reuse* )

Mengusahakan untuk mencari barang-barang yang bisa dipakai kembali, dan menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai guna memaksimalkan umur suatu barang.

3. Mendaur ulang ( *Recycle* )

Selain mencari barang yang dapat dipakai kembali, dapat pula mencari barang yang dapat didaur ulang. Sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan bukan menjadi sampah.

4. Mengganti ( *Replace* )

Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan sekitar. Ganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama, serta menggunakan barang yang ramah lingkungan.

5. Menghargai ( *Respect* )

Metode ini menggunakan rasa kecintaan pada alam, sehingga akan menimbulkan sikap bijaksana sebelum memilih.

#### 4. Cara Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah erat kaitannya dengan masyarakat karena dari sampah tersebut akan hidup mikroorganisme penyebab penyakit (bakteri,pathogen) jadi sampah harus benar-benar dapat diolah agar tidak menimbulkan masalah.



Menurut Panji Nugroho (2013), berbagai cara yang dapat mengurangi efek negatif dari sampah antara lain:

1. Penumpukan

Metode ini dilakukan dengan cara menumpuk sampah sampai membusuk, sehingga dapat menjadi kompos.

2. Pembakaran

Pembakaran merupakan cara yang sering dilakukan, bahkan berbagai TPA metode ini kerap dipakai pemerintah, kelemahan metode ini adalah tidak semua sampah habis dibakar.

3. *Sanitary Landfill*

Metode ini juga kerap digunakan pemerintah, cara penerapannya adalah dengan membuat lubang baru untuk mengubur sampah.

4. Pengomposan

Cara ini sangat dianjurkan karena berdampak positif dan menghasilkan barang bermanfaat dari sampah yang berguna bagi lingkungan dan alam.

## 5. Permasalahan Sampah

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia baik kota besar maupun kecil belum memiliki sistem penanganan sampah yang baik. Pada umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama yaitu metode kumpul-angkut-buang. Sebuah metode klasik yang akhirnya berubah

menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan.

Masalah-masalah sampah yang timbul di kota-kota besar adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan, dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri, maupun kantor (Bahar, 1986:2). Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman yang kacau mempersulit proses pengelolaan sampah sehingga akhirnya menumpuk. Meningkatnya jumlah penduduk sangat mempengaruhi peningkatan jumlah dan keragaman sampah. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, baik karena kelahirannya ataupun migrasi, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan adanya perubahan standar hidup masyarakat yang mengutamakan produk hasil kebudayaan modern untuk konsumsinya, menyebabkan makin meningkatnya volume sampah dalam setiap harinya yang apabila tidak dikelola secara baik dan benar akan mengakibatkan pencemaran lingkungan.

#### **D. Program Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R Berbasis Masyarakat**

Program TPST 3R Mulyoagung Bersatu yang merupakan sarana pengolahan sampah terpadu yang berada di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pada mulanya TPST yang digerakkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Mulyoagung ini banyak menuai keraguan

dalam kinerja kedepannya karena hanya mengolah sampah yang merupakan sisa dari barang yang telah dimanfaatkan nilai gunanya. Akan tetapi sejak mulai dioperasikannya TPST 3R Mulyoagung Bersatu ini dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan karena sampah di wilayah Desa Mulyoagung kini telah mampu untuk menjawab semua keraguan tersebut dengan mampu mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta membuka kesempatan kerja baru bagi warga yang tidak mampu dan tidak berpendidikan di wilayah sekitar TPST 3R Mulyoagung Bersatu.

### **1. Tujuan**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat meliputi : pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan dalam penanganan sampah meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pengurangan dan penanganan sampah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimana dalam mengurangi sampah dapat meliputi : pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi :

menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurut oleh proses alam, dan mengumpulkan juga meyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

## 2. Tindakan

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, yaitu :

- a. Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat.
- b. Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R.
- c. Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R.

Terkait mewujudkan konsep 3R salah satu cara penerapannya adalah melalui TPST 3R Berbasis Masyarakat, yang diarahkan kepada daur ulang sampah (recycle). Hal ini dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya, karena adanya potensi pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan baku sekunder kegiatan industri seperti plastik, kertas, logam, gelas, dan lain-lain.

### ***Reduce (R1)***

*Reduce* atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah dilingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan

menghasilkan banyak sampah menjadi hemat, efisien, dan sedikit sampah, namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut.

### ***Reuse (R2)***

*Reuse* berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengelolaan) seperti menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan botol bekas minuman untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan isi ulang (*refill*) dan lain-lain.

### ***Recycle (R3)***

*Recycle* berarti mendaur ulang suatu bahan yang tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengelolaan seperti mengolah sisa kain perca untuk menjadi selimut, kain lap, keset kaki, atau mengolah botol/plastik bekas menjadi ember, hanger, pot, atau mencetak kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak ulang menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah dan lain-lain.

Pada sistem pengelolaan sampah yang dilakukan pada TPST 3R Mulyoagung Bersatu yang telah menerapkan prinsip pengolahan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan sebaik mungkin agar memberikan manfaat dan menciptakan keefisienan dalam *cost and benefit* baik yang dikeluarkan maupun yang bisa diperoleh TPST 3R Mulyoagung Bersatu dalam pengolahan sampah yang dilakukan, menghasilkan serangkaian proses kerja yang dinamakan Proses Kerja Divisi 1 TPST 3R Mulyoagung Bersatu dengan alur kerja seperti gambar berikut:

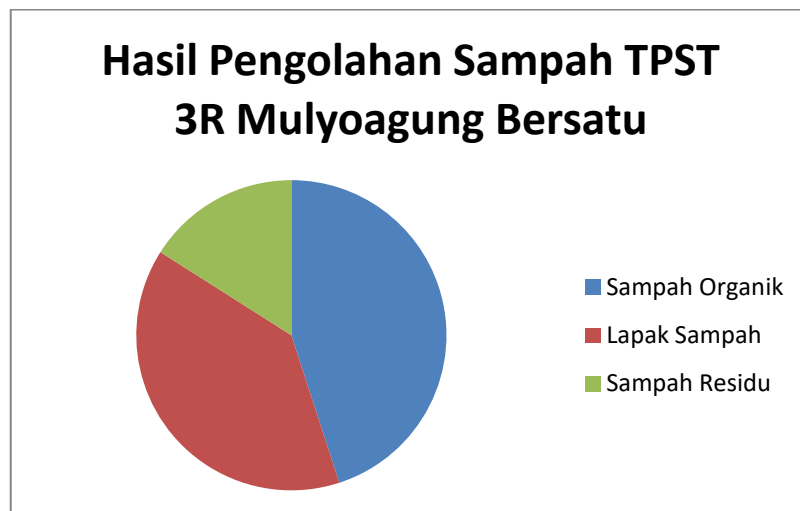


**Gambar 5 Proses Kerja TPST Mulyoagung Bersatu**

*Sumber : dokumen TPST 3R Mulyoagung Bersatu*

Dimana dari hasil pengolahan yang dilakukan dengan mengacu pada proses kerja diatas mampu untuk mengolah sampah yang masuk ke TPST 3R Mulyoagung Bersatu menjadi :





**Grafik 2 Hasil Pengolahan Sampah TPST 3R Mulyoagung Bersatu**

*Sumber : dokumen TPST Mulyoagung Bersatu*

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa 39% sampah organik yang kemudian diolah untuk menjadi pupuk kompos organik. 45% sampah bernilai ekonomis (lapak sampah), dimana sampah pada jenis ini terbagi atas dua jenis yakni sampah berjenis lapak kertas (kertas, plastik, kaleng, dll) dan limbah sampah sisa dari bahan makanan yang setelah melalui beberapa proses pengolahan sampah tersebut dapat untuk dijual kembali misalnya untuk lapak kertas dijual kepada penadah untuk didaur ulang, sementara untuk sampah sisa bahan makanan dijual kepada peternak disekitar untuk dijadikan bahan makanan hewan peliharaannya. Dan 16% Sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan lagi yang kemudian akan dibuang ke TPA.

### **3. Prosedur**

#### **a. Landasan Operasional Pengelolaan Sampah Skala Kawasan**

- 1) Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan volume dan pemilahan sampah.
- 2) Diperlukan operasional pengelolaan sampah mulai dari sumber, pengangkutan/pengumpulan, pemilahan sampah, pihak penerima daur ulang (lapak), dan pengangkutan ke TPA.
- 3) Diperlukan area kerja pengelolaan sampah skala kawasan yang disebut TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah), yaitu area pembongkaran muatan gerobak, pemilahan, perajangan sampah, pengomposan, tempat sampah residu, penyimpanan barang lapak dan pencucian.
- 4) Kegiatan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah 3R meliputi: pemilahan sampah, pembuatan kompos, pengepakan bahan daur ulang, dll.
- 5) Sampah residu dilarang untuk dibakar di tempat, tapi dibuang langsung ke TPA.

#### **b. Metode Operasional Pengelolaan Sampah Skala Kawasan**

- 1) peralatan pengumpulan sampah dikawasan perumahan baru (cakupan luas dan jalan lebar) dapat dilakukan dengan menggunakan motor sampah, sedangkan untuk kawasan perumahan non kompleks dan perumahan kumuh/bantaran sungai dapat dilakukan dengan gerobak.



- 2) Metode pengumpulan sampah dapat dilakukan secara individual (*door to door*) maupun komunal (masyarakat membawa sendiri sampahnya ke wadah yang sudah ditentukan).
- 3) Motor/gerobak sampah mengumpulkan sampah terpilah dapat dimodifikasi dengan sekat atau dilengkapi karung-karung besar (3 unit atau sesuai dengan jenis sampah).

#### 4. Keberlanjutan Program

Aspek keberlanjutan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan proses pengelolaan yang sudah terbina. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa aspek keberlanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya lembaga kelompok masyarakat sebagai organisasi pengelola tidak formal namun terlegalisir serta sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- b. Adanya dukungan peraturan setingkat kelurahan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- c. Adanya dana operasional pengelolaan maupun biaya pemeliharaan atau investasi penambahan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan. Dana tersebut dapat berasal dari iuran masyarakat serta hasil penjualan kompos.

- d. Adanya dukungan teknologi ramah lingkungan dan tersedianya prasarana dan sarana persampahan skala kawasan sesuai kebutuhan masyarakat.
- e. Adanya peran aktif masyarakat untuk melaksanakan program 3R terutama yang berkaitan dengan perubahan perilaku dan budaya memilah sampah sejak dari sumbernya.
- f. Adanya dukungan dari instansi pengelola sampah tingkat perkotaan untuk pengangkutan residu, penyerapan produk kompos dan material daur ulang.
- g. Adanya pola monitoring dan evaluasi dari instansi terkait baik ditingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten bahkan ditingkat yang lebih tinggi yaitu provinsi dan pemerintah pusat. Hasil monitoring dan evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi proses replikasi atau pengembangan yang diperlukan serta pendanaan yang lebih akurat untuk mengetahui hasil pencapaian program 3R secara nasional.

## **E. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan sebagai terjemahan *empowerment* mengandung dua pengertian, yaitu (a) *to give power or authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, (b) *to give ability to* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan atau

bagaimana menciptakan peluang mengaktualisasikan keberdayaan seseorang (Randy R dan Riant N, 2007: 279-280). Chatarina Rusmiyati (2011: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya, atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Permendagri No.7 Tahun 2007). Winarni dalam Ambar Teguh Sulistiyani (2004:79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses atau upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemberian pengetahuan dan ketrampilan dalam mencapai suatu kemandirian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai penerima pasif saja namun

ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan pemerintah berperan sebagai fasilitator atau pelayan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dan dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat dari yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya, bukan membuat masyarakatnya menjadi tergantung pada berbagai program pembangunan yang ada, tetapi harus dihasilkan dan dinikmati atas hasil usaha sendiri.

Inti dari pemberdayaan sendiri menyangkut tiga hal yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Meliputi:

- 1) Penyadaran masyarakat. Penyadaran masyarakat dilaksanakan dengan sosialisasi. Tujuannya yaitu mengkomunikasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan serta menumbuhkan keinginan dan kemauan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut.
- 2) Proses pemberdayaan masyarakat. Dilaksanakan dengan transformasi pengetahuan dan keterampilan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum pada taraf subjek.
- 3) Pemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi individu-individu dalam masyarakat saja, tetapi juga unsur-unsur pranata penduduknya. Misalnya, nilai-nilai modern, kerja keras, hemat, kemerdekaan, rasa tanggung jawab dan sebagainya. Demikian pula dengan pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.

## **2. Tujuan Pemberdayaan**

Jamasy (2004:60) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam mereapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004:80) menjelaskan bahwa:

“tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat

demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material”.

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.

### **3. Proses-proses Pemberdayaan**

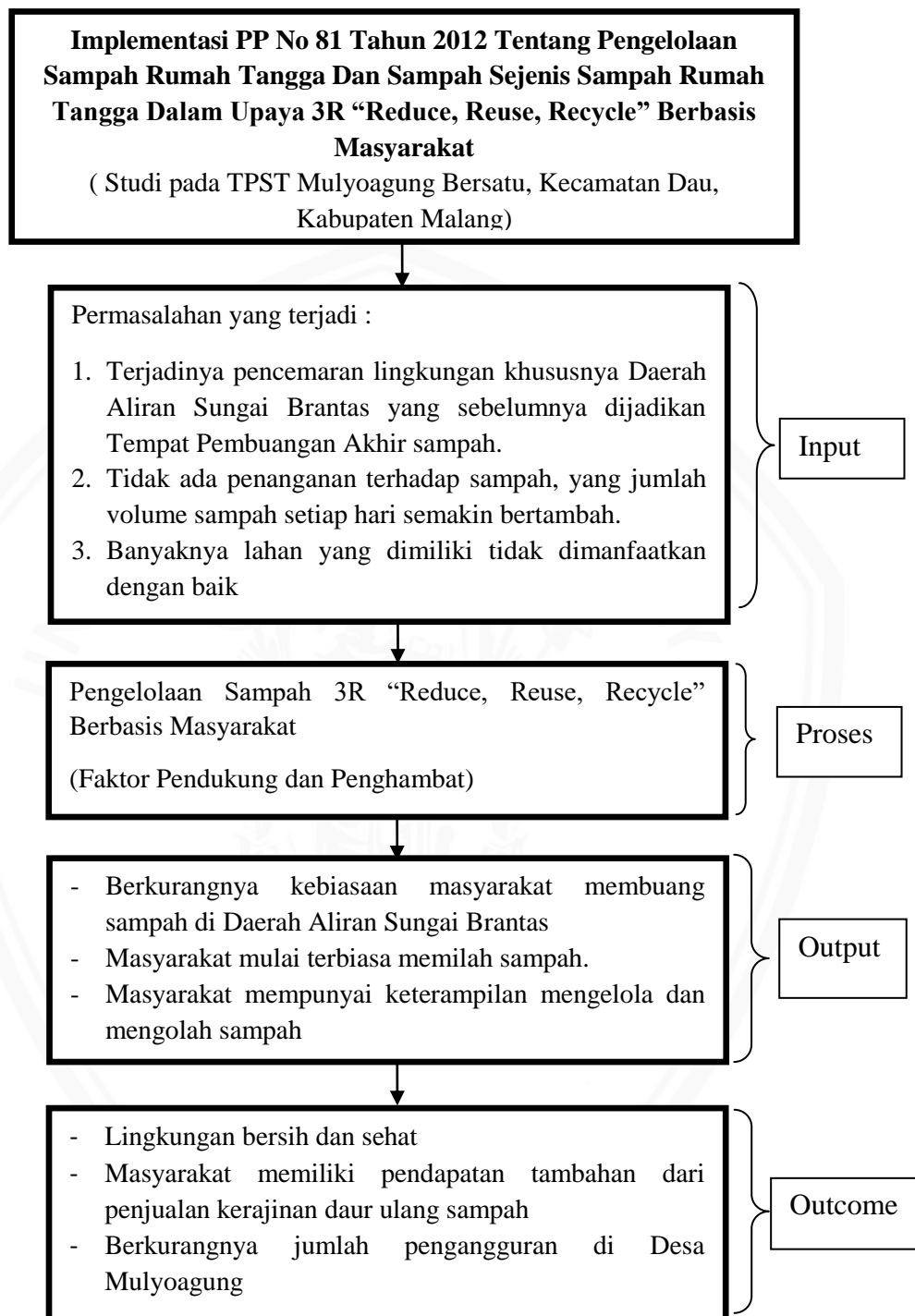
Proses pemberdayaan dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan merupakan suatu upaya dan proses memberdayakan masyarakat, individu, organisasi, keluarga, dan kelompok demi tercapainya tujuan. Menurut Fahrudin (2011:96) terdapat tiga pokok dalam proses pemberdayaan, yaitu:

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada.
- b. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output.

- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan system yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktek eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat.



## F. Kerangka Berfikir



**Gambar 6 Kerangka Berpikir**

*Sumber : Peneliti, 2017*



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2014:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan penelitian deskriptif adalah pilihan peneliti karena tujuan peneliti yang ingin mendapatkan data untuk mendeskripsikan keadaan atau fenomena secara menyeluruh tentang implementasi Program Pengelolaan Sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. Penelitian deskriptif sendiri lebih mengarah pada data yang berbentuk olahan kata, serta hasilnya berupa sajian atau kutipan-kutipan.

Kesimpulan yang diambil tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian sistematis, faktual, akurat, dan jelas serta bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala lainnya di masyarakat.

## B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif bergerak berdasarkan fenomena atau permasalahan yang ada, sehingga lingkungannya terkadang masih sangat luas. Fokus penelitian menjadi salah satu upaya untuk membatasi permasalahan yang ada. Spradley dalam Sugiyono (2012:208) menyatakan bahwa "*A focuses refer to a single cultural domain or a few related domains*". Maksudnya adalah fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Menurut Moleong, ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai dalam menentukan fokus penelitian, yakni pertama untuk membatasi permasalahan melalui pembatasan bidang inkuiri dan yang kedua adalah untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (Moleong, 2014:94). Maksud tujuan fokus yang pertama adalah membatasi lokasi penelitian lainnya. Tujuan fokus yang kedua (kriteria mengeluarkan-memasukan) adalah untuk membatasi data dan informasi yang masuk, karena dalam kondisi penelitian lapangan, peneliti kualitatif akan dihadapkan pada banyak data yang bersumber dari observasi, wawancara, dan sebagainya. Secara garis besar penentuan fokus akan mempermudah peneliti dalam hal memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan. Data yang relevan akan dimasukkan dan dianalisis, sedangkan data yang tidak relevan akan dikeluarkan.

Dengan dasar pemahaman tersebut, maka fokus penelitian di dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya pengurangan sampah melalui implementasi program pengelolaan sampah berbasis 3R pada Kantor TPST Mulyoagung Bersatu.
  - a. Kebijakan dan Strategi, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
  - b. Pendanaan
  - c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pengurangan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu melalui Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat.
  - a. Faktor Pendukung
    1. Sarana dalam Pengelolaan Sampah yang Memadai
    2. Komitmen Pengurus KSM TPST Mulyoagung Bersatu dalam Mengelola Sampah
  - b. Faktor Penghambat
    1. Biaya Operasional TPST Mulyoagung Bersatu yang Tinggi
    2. Sampah dari Masyarakat yang Belum Terpilah

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lokasi yang dipilih dalam melaksanakan penelitian ini adalah di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat atau peristiwa yang di dalamnya peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari objek penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah TPST Mulyoagung Bersatu. Pemilihan situs ini karena dalam pelaksanaannya Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu mengalami permasalahan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah. Biaya operasional pengelolaan sampah yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat membuat kegiatan pengangkutan, pemilahan, dan pengomposan sampah menjadi terhambat.

### **D. Sumber Data**

Berdasarkan proses pengumpulan data di lapangan peneliti berusaha memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat dan dapat menjadi pegangan akan keakuratan dari hasil peneliti nantinya. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dikelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya yaitu :

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah suatu objek atau dokumen original atau dapat dikatakan material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*".

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Sumber data primer adalah sebagai berikut:

- a. Ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) TPST Mulyoagung Bersatu.
- b. Beberapa Pegawai TPST Mulyoagung Bersatu.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat mendukung dan memperkuat data primer. Sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen seperti peraturan pemerintah, browsing di internet, laporan yang memuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik di dalam menggali data dilapangan untuk keperluan peneliti. Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan fokus penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakanteknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tatap muka langsung dan melakukan tanya jawab terhadap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu dan beberapa Pegawai TPST Mulyoagung Bersatu.

2. Obsevarsi

Observasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui panca indera yang dilakukan secara sistematis, yaitu dengan memperoleh keyakinan atas data yang didapat melalui kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke situs penelitian yaitu TPST Mulyoagung Bersatu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan cara mencatat ulang atau mendokumentasikan data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain. Peneliti mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal nilai-nilai, masalah, dan upaya yang dianut oleh objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sarana dokumentasi adalah dokumen, arsip, majalah, dan internet yang berhubungan dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil data, mengelola, menyajikan, menganalisis dan mendeskripsikan data atau informasi yang telah didapatkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Peneliti

Peneliti sendiri dalam mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga didapatkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara representatif yang berguna sebagai bahan analisa.

### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan untuk memandu wawancara. Pedoman wawancara akan dikaitkan sesuai dengan fokus penelitian peneliti. Pedoman wawancara digunakan untuk mempermudah wawancara maka dipergunakan pedoman agar hasil yang diharapkan dapat maksimal. Pedoman wawancara ini dibuat oleh peneliti dengan cara mendalami fokus permasalahan yang diteliti dan mendalami teori yang digunakan. Agar lebih mudah peneliti dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan yang diajukan tertian dalam dimensi pertanyaan. Dimensi pertanyaan tersebut sesuai dengan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

### 3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang dalam penelitian ini terdiri dari buku catatan, bolpoin atau pensil, kamera *Hand Phone*, dan alat perekam suara. Instrument-

instrumen ini yang membantu peneliti dalam melakukan dokumentasi, sehingga apa yang terjadi dilapangan dapat didokumentasikan dengan baik. Selain itu instrument ini juga membantu peneliti dalam pengarsipan data yang didapat selama di lapangan, sehingga memudahkan peneliti saat melakukan proses analisis data.

### G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ilmiah dikaitkan dengan validitas dan reabilitas sebagai syarat utama menentukan keabsahan data yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Menurut Moleong (2014, 320) keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar,
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Penelitian ini menerapkan teknik pemeriksaan kredibilitas data menggunakan triangulasi. Triagulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data untuk memeriksa atau sebagai pembanding terhadap data. Denzim (1987) dalam Moleong (2014,321) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber untuk membandingkan dan



memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sumber yang akan dilakukan pengujian keabsahan dalam penelitian ini yaitu informasi yang berasal dari Kantor TPST Mulyoagung Bersatu Kabupaten Malang. Teknik triangulasi dengan sumber ini dilakukan dengan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan beberapa berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan,
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **H. Analisis Data**

Analisis data menurut Miles dan Huberman dikutip oleh Sugiono (2011:91) bahwa analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alur kegiatan yang terjadi bersamaan, analisis data terdiri dari tiga komponen kegiatan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Adapun komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting untuk dilakukan, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian kan berlangsung sampai penelitian mendapat jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, obsevarsi atau pengamatan dan dokumentasi.

## 2. Kondensasi Data

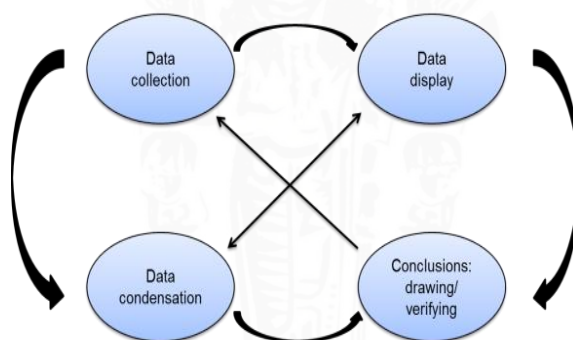
Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data tersebut kemudian ditelaah. Pada tahapan ini, peneliti mengabaikan data yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian. Sehingga data dalam tahapan ini hanya berhubungan dengan judul penelitian.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data berisi kumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data juga diikuti dengan analisis data. Penyajian data yang paling sering dilakukan pada data kualitatif ialah menggunakan bentuk teks naratif, tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif. Dengan adanya penyajian data, akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

#### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk meninjau ulang catatan lapangan agar dapat menemukan makna dari data yang didapat yaitu mencari pola, tema, hubungan yang sama, hal-hal yang sering muncul, maupun hal-hal yang jarang muncul serta hal-hal lainnya untuk menemukan suatu kesimpulan sementara. Selanjutnya dari kesimpulan sementara tersebut peneliti akan berusaha untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat final.



**Gambar 7 Analisis Data Model Interaktif**

*Sumber : Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14*

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

###### a. Keadaan Geografis



**Gambar 8 Peta Kabupaten Malang**

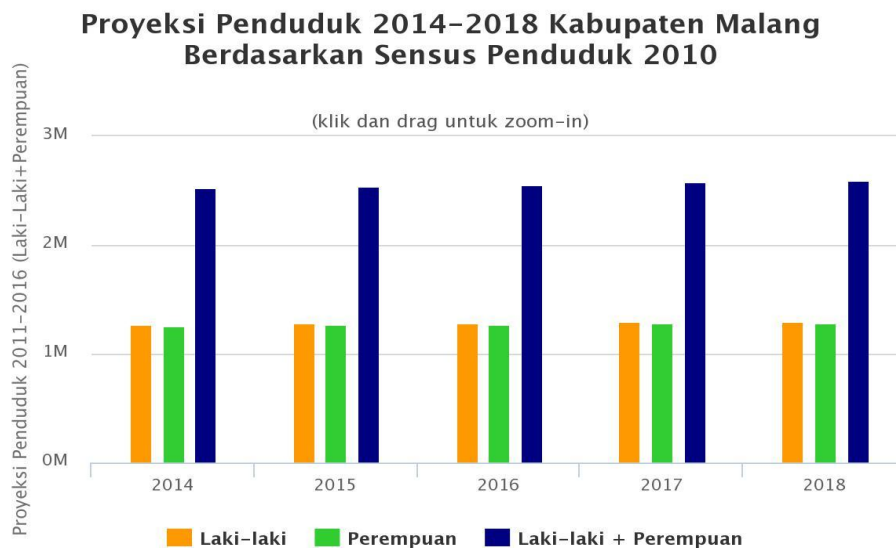
Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten dan

Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat-Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto.

Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara  $112^{\circ}17',10,90''$  Bujur Timur dan  $122^{\circ}57',00,00''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}44',55,11''$  Lintang Selatan dan  $8^{\circ}26',35,45''$  Lintang Selatan. Letak geografis tersebut menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi Utara maupun Selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Kabupaten Malang berada diatas area seluas  $2.977,05 \text{ km}^2$  yang terbagi dalam 33 kecamatan dan 390 desa/kelurahan. Dari seluruh desa/kelurahan yang ada, 12 di antaranya berstatus kelurahan dan sisanya 378 berstatus desa. Kabupaten Malang merupakan daerah yang kaya akan potensi diantaranya pertanian, perkebunan, agro eco-wisata, wisata pantai dan lain sebagainya.

### b. Jumlah Penduduk



**Grafik 3 Proyeksi Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2014-2018**

*Sumber: BPS Tahun 2017*

Menurut hasil Susenas (Survei sosial ekonomi nasional), penduduk Kabupaten Malang tahun 2017 berjumlah 2.591.795 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.302.771 jiwa dan perempuan 1.289.024 jiwa.

### c. Kondisi Persampahan

Penanganan masalah persampahan di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun cukup berhasil dan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 telah mampu menangani sebanyak 376 m<sup>3</sup>/hari atau sebesar 37,8%, pada tahun 2011 meningkat menjadi 443,5 m<sup>3</sup>/hari atau sebesar 44,5%. Pada akhir tahun 2012 telah mencapai 682 m<sup>3</sup>/hari atau sebesar 47,5%. Untuk mengoptimalkan pengelolaan

sampah di Kabupaten Malang, Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah menyusun program unggulan antara lain :

**1) TPST 3R**

Program ini bertujuan untuk membuka peluang kerja, pemberdayaan masyarakat kecil, lingkungan bersih dan sehat, dan *Pro Poor, Pro Job, and Pro Environment*.

**2) Bank Sampah**

Program ini bertujuan untuk membuka peluang kerja, pengelolaan sampah dari sumbernya, lingkungan *green, clean, and hygiene* dan *Pro Poor, Pro Job, and Pro Environment*.

**3) TPA Wisata Edukasi**

Program ini bertujuan untuk *Open Dumping*, pemanfaatan gas methane sebagai BBG, peluang kerja bagi masyarakat sekitar, laboratorium pengelolaan sampah (edukasi).

Dengan adanya program-program tersebut diharapkan mampu untuk mengurangi masalah persampahan yang ada di Kabupaten Malang yang dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

## **2. Gambaran Umum Kecamatan Dau**

### **a. Keadaan Geografis**

Kecamatan Dau merupakan salah satu dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang yang terletak di wilayah Barat. Secara Astronomis Kecamatan Dau terletak diantara 112,3311 Bujur Timur sampai 112,3563 Bujur Timur dan



7,5775 Lintang Selatan sampai 7,5494 Lintang Selatan. Secara geografis Kecamatan Dau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Karangploso

Sebelah Timur : Kecamatan Dinoyo - Kota Malang

Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir

Sebelah Barat : Kecamatan Junrejo – Kota Batu

Mengacu pada data potensi Kecamatan dau, letak geografis sekitar 7 desa berada di lereng dan 3 desa di daratan dengan topografi desa tergolong perbukitan dan daratan.

Kecamatan Dau terdiri dari 10 desa/kelurahan, antara lain:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1) Kucur        | 6) Tegalweru    |
| 2) Kalisongo    | 7) Landungsari  |
| 3) Karangwidoro | 8) Gadingkulon  |
| 4) Petungsewu   | 9) Mulyoagung   |
| 5) Selorejo     | 10) Sumbersekar |

Memiliki luas wilayah 41,96 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,41% dari total luas Kabupaten Malang. Dari segi topografi sebagian Kecamatan dau di wilayah bagian Barat merupakan dataran tinggi dan di bagian Timur merupakan daerah dataran yang semua wilayahnya relatif subur untuk pembangunan pertanian.

### 3. Profil TPST Mulyoagung Bersatu

TPST Mulyoagung Bersatu merupakan salah satu TPST di Kabupaten Malang yang berlokasi di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau. Desa Mulyoagung memiliki luas wilayah 296,584 Ha dan memiliki populasi penduduk mencapai 3970 Kepala Keluarga. Batas Desa Mulyoagung sebelah Timur adalah Kota Malang dan batas sebelah Barat adalah Kota Batu.

TPST Mulyoagung Bersatu berdiri dan mulai beroperasi pada bulan Desember 2010, total biaya yang diperlukan untuk membangun TPST ini mencapai  $\pm$  1,4 Miliar Rupiah. Sumber dana yang digunakan untuk membangun TPST Mulyoagung Bersatu diantaranya berasal dari:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar  $\pm$  100 Juta Rupiah.
2. APBN sebesar 1,2 Miliar Rupiah.
3. APBD Kabupaten Malang sebesar 100 Juta Rupiah.

Pada proses awal operasi TPST, diangkat 96 pengurus KSM yang terdiri dari para ketua RT/RW serta tokoh masyarakat Desa Mulyoagung dan 44 tenaga pegawai yang terbagi menjadi beberapa bagian. Keseluruhan pegawai yang dipekerjakan oleh TPST Mulyoagung Bersatu berasal dari masyarakat Desa Mulyoagung sendiri. Hal ini dikarenakan TPST Mulyoagung Bersatu berusaha untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Mulyoagung.

Visi dari TPST Mulyoagung Bersatu adalah menciptakan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan nyaman di Desa Mulyoagung. Sedangkan Misi dari TPST Mulyoagung Bersatu adalah:

- a. Membantu pemerintah dalam rangka upaya meningkatkan kebersihan lingkungan.
- b. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan sampah secara terpadu.
- c. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif berbasis sampah.
- d. Meningkatkan kerjasana serta kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

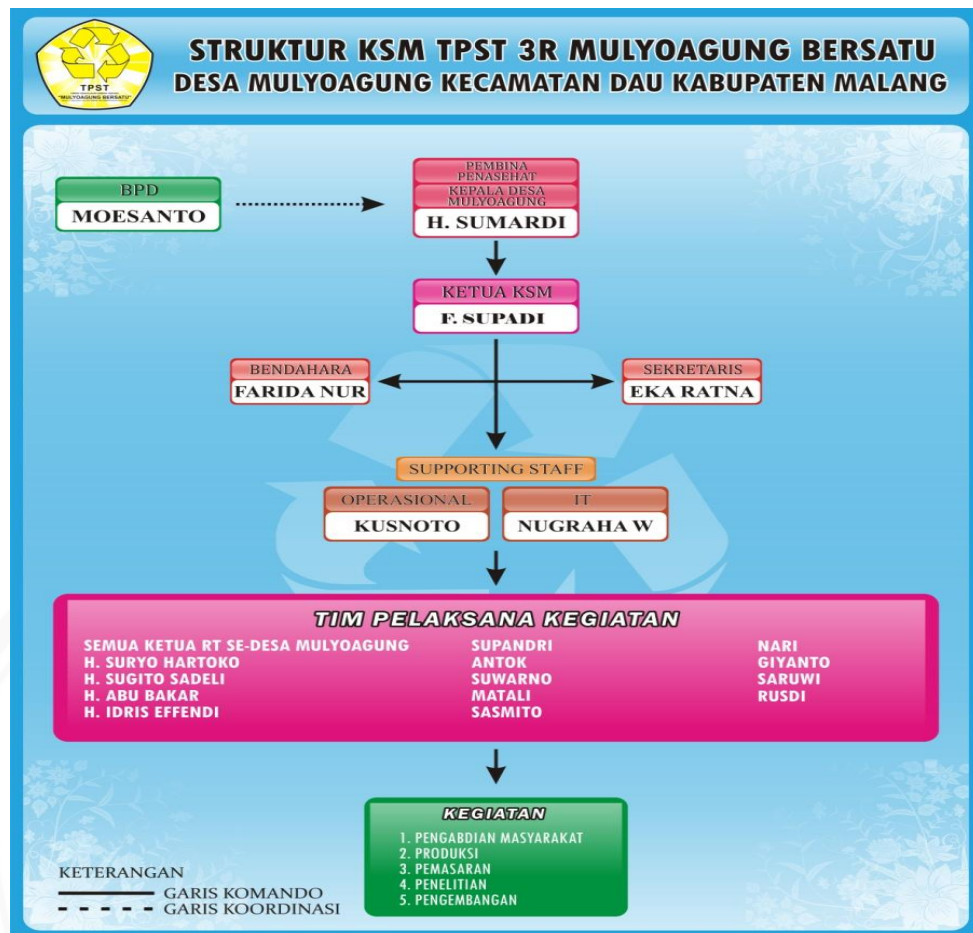
Dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung, diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah yang ada di Desa Mulyoagung dan sekitarnya. Mengingat jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh Desa Mulyoagung setiap hari rata-rata mencapai 9-10 ton sampah. Kondisi seperti ini pasti membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai guna mencapai pelayanan persampahan yang optimal. Dalam bidang infrastruktur pun, TPST Mulyoagung Bersatu juga mengalami perkembangan demi menunjang proses pelayanan dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dimana infrastruktur ini merupakan salah satu syarat penting untuk pembangunan TPST. Berikut infrastruktur yang dimiliki TPST Mulyoagung Bersatu:

**Tabel 1**  
**Infrastruktur TPST Mulyoagung**

No.	Jenis Bangunan	Luas	Jumlah
1.	Bangunan hanggar permanen	1008 m <sup>2</sup>	2 hanggar
2.	Bangunan hanggar non permanen	194 m <sup>2</sup>	1 hanggar
3.	Gedung administrasi	36 m <sup>2</sup>	1 gedung
4.	Gedung peralatan dan mesin	40 m <sup>2</sup>	1 gedung
5.	Bangunan gazebo	38,5 m <sup>2</sup>	1 bangunan
6.	Pos keamanan	3 m <sup>2</sup>	1 bangunan
7.	Toilet	2,5 m <sup>2</sup>	2 buah
8.	Kandang kambing	36 m <sup>2</sup>	1 buah
9.	Kolam ikan	21 m <sup>2</sup>	6 buah
10.	Gedung MCK	80 m <sup>2</sup>	1 gedung
11.	Gedung serbaguna	96 m <sup>2</sup>	1 gedung
12.	Area pertanian tanaman toga	120 m <sup>2</sup>	1 area

*Sumber : Dokumen TPST Mulyoagung Bersatu, 2016*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka diperlukan struktur organisasi pengurus untuk mempermudah dalam proses bekerja. Seluruh kegiatan di TPST Mulyoagung Bersatu harus dilaporkan kepada Kepala Desa Mulyoagung. dan pada laporan tersebut berisi tentang keuangan serta yang dianggap penting untuk dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas TPST Mulyoagung Bersatu kepada masyarakat. Untuk mewujudkan manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah maka harus transparan, terbuka, akuntabel. Berikut struktur organisasi pada TPST Mulyoagung Bersatu:



**Gambar 9 Struktur Organisasi TPST Mulyoagung Bersatu**

*Sumber: dokumen TPST Mulyoagung Bersatu, 2016*

## B. Penyajian Data

### 1. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 Mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu

#### a. Kebijakan dan Strategi, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini masih belum dapat ditangani secara baik terutama pada negara-negara yang

berkembang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia baik kota besar maupun kecil belum memiliki sistem penanganan sampah yang baik. Pada umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama yaitu metode kumpul-angkut-buang. Sebuah metode klasik yang akhirnya berubah menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan.

Meningkatnya jumlah penduduk sangat mempengaruhi peningkatan jumlah dan keragaman sampah. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, baik karena kelahirannya ataupun migrasi, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan adanya perubahan standar hidup masyarakat yang mengutamakan produk hasil kebudayaan modern untuk konsumsinya, menyebabkan makin meningkatnya volume sampah dalam setiap harinya yang apabila tidak dikelola secara baik dan benar akan mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diperlukan perubahan paradigma yang lebih mengedepankan proses pengelolaan sampah yang dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan

masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya sebelum akhirnya sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Program TPST 3R Berbasis Masyarakat adalah paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi disemua tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan sampah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah. Program TPST 3R Berbasis Masyarakat ini tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, tetapi juga menyangkut manajemen yang tepat dalam setiap pelaksanaannya.

Penerapan konsep 3R dalam Program TPST 3R Berbasis Masyarakat adalah dengan mengarahkan pada pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan dan penanganan sampah tersebut juga sejalan dengan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimana dalam mengurangi sampah dapat meliputi : pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan dalam penanganan sampah meliputi : menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diuraikan oleh proses alam, dan mengumpulkan juga menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Di Kabupaten Malang, salah satu TPS hasil dari implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat adalah TPST Mulyoagung Bersatu yang berlokasi di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau. Desa Mulyoagung merupakan salah satu desa yang menjadi tujuan perpindahan penduduk dari kota maupun luar daerah.



Hal ini disebabkan oleh tapal batas Desa Mulyoagung yang berbatasan langsung dengan dua kota, yaitu Kota Malang untuk batas sebelah Timur dan Kota Batu untuk batas sebelah Barat. Keberadaan penduduk desa yang heterogen berpengaruh terhadap tata cara kehidupan penduduk yang semula bersifat perdesaan menjadi perkotaan sehingga lambat laun dapat menggeser tata cara perdesaan yang selama ini digunakan.

Kebijakan dan strategi mengenai pengelolaan sampah TPST ini juga diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Malang No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang juga mengatur mengenai pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kebijakan mengenai Peraturan Desa Mulyoagung No. 2 Tahun 2012 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk menuju Desa Mulyoagung yang Bersih, Sehat, dan Bermutu juga mengatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah di Desa Mulyoagung.

Kegiatan mengurangi dan menangani sampah terkait erat dengan konsep 3R, yang terdiri atas:

1. *Reduce* (mengurangi timbulan sampah), yaitu mengurangi kegiatan konsumsi yang menyebabkan timbulan sampah. *Reduce* juga berarti mengurangi penggunaan barang-barang yang bisa merusak lingkungan. Mengurangi belanja barang-barang yang tidak “terlalu” dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan atau apapun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Kurangi juga dalam penggunaan kertas tissue diganti menggunakan sapu tangan. Contoh kegiatan *reduce* dalam sehari-hari misalnya memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, hindari memakai dan membeli produk yang

menghasilkan sampah dalam jumlah besar, menggunakan produk yang dapat diisi ulang (misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali), mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.

2. *Reuse* (menggunakan kembali bahan yang berpotensi menimbulkan sampah), yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Misalnya memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang (misalnya menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tissue, menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik).
3. *Recycle* (mendaur ulang sampah), yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. *Recycling* merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, dimana dilakukan pemisahan atas benda-benda bernilai ekonomis seperti 6 macam jenis limbah bernilai ekonomis dari sampah yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali baik dalam bentuk yang sama atau berbeda dari bentuk semula.

Pengurangan sampah yang terjadi di Desa Mulyoagung ini meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pelaku usaha dalam melaksanakan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan mudah diurai oleh proses alam. Jumlah timbulan sampah yang terjadi di Desa Mulyoagung sudah berkurang setiap

tahunnya dikarenakan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pengurangan sampah cukup tinggi.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk Desa Mulyoagung dari waktu ke waktu mengakibatkan semakin sempitnya lahan-lahan yang kosong karena berubah menjadi permukiman. Salah satu yang timbul dari meningkatnya jumlah penduduk di Desa Mulyoagung adalah permasalahan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran lingkungan di Desa Mulyoagung. Volume sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh warga Desa Mulyoagung semakin bertambah, hal tersebut bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Mengingat sudah banyak warga yang tidak mempunyai lahan untuk membuang sampah rumah tangga masing-masing, dan mengingat kondisi geografis Desa Mulyoagung tidak memiliki lahan yang layak sebagai tempat pembuangan sampah, warga Desa Mulyoagung membuang sampah lahan yang berada di tepi Sungai Brantas. Dengan bertambahnya penduduk Desa Mulyoagung maka bertambah pula volume sampah sehingga lahan tersebut tidak muat dan sampah mulai longsor ke Sungai Brantas sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jika musim hujan tiba tidak jarang pula terjadi banjir di Desa Mulyoagung.

Pada tahun 1994, pemerintah Desa Mulyoagung mengajukan kontainer sampah sebagai TPS (Tempat Pembuangan Sampah) namun tidak terealisasi. Setelah mendapat teguran dari Dinas Kebersihan mengenai pembuangan sampah yang dapat mencemari lingkungan, Kepala Desa Mulyoagung meminta solusi dari

permasalahan sampah yang ada di Desa Mulyoagung. Dan pada tahun 2008 Desa Mulyoagung melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berusaha menciptakan solusi dari permasalahan sampah yang ada di Desa Mulyoagung. Solusi yang dihasilkan adalah membangun TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) sebagai solusi akhir dari masalah sampah yang sebelumnya dibuang di daerah alisan Sungai Brantas. Tahun 2009 dimulai dengan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) seluas 2000 m<sup>3</sup> yang dihasilkan oleh tanah hibah dari Desa Mulyoagung. TPST 3R Berbasis Masyarakat yang berdiri pada tahun 2010 ini mulai berani dioperasikan oleh masyarakat pada tahun 2011.

Dalam pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang dialami adalah adanya warga Desa Mulyoagung yang tidak setuju dibangunnya TPST. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna Selaku Staff Administrasi KSM TPST Mulyoagung Bersatu:

“Pada dulunya ada beberapa warga yang menolak. Karena menurut mereka sampah itu akan bau, kotor, busuk, dan akan menimbulkan pencemaran. Dulu mereka mengira yang akan dibangun adalah TPA. TPA kan Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Jadi sampah akan ditumpuk begitu saja. Setelah dilakukan sosialisasi, warga pun mengerti bahwa yang dibangun adalah TPST.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Ibu Ratna, Staff Administrasi KSM TPST Mulyoagung Bersatu).

Pro dan kontra dalam pembangunan TPST pasti ada. Sebagai warga yang baik, seharusnya masyarakat Desa Mulyoagung mencari informasi terlebih dahulu untuk apa tujuan dibangunnya TPST Mulyoagung Bersatu. Dengan adanya dukungan penuh dari warga Desa Mulyoagung, maka akan meminimalisir

kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu.

Pada tahun 2008 dengan difasilitasi oleh beberapa lembaga yang ada, TPST Mulyoagung Bersatu mulai dibangun. Dengan berjalannya program TPST Mulyoagung Bersatu ini pegawai di TPST ini awalnya banyak yang mengundurkan diri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Abidah, Ibu Paimah, dan Ibu Miseni selaku pegawai TPST Mulyoagung Bersatu:

“iya mbak, dulu waktu berdiri pertama kali ada beberapa pegawai yang mengundurkan diri karena tidak kuat dengan bau sampah. Tapi setelah ada perbaikan dari kepalaanya sampah jadi dikelola dengan baik akhirnya sudah tidak terlalu bau lagi. Tapi kalau sekarang senang mbak bekerja disini, enak. Biasanya kita diajak rekreasi ke Jogja terus kemarin-kemarin ini ke Cangar mbak.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Ibu Abidah, Ibu Paimah, dan Ibu Miseni selaku pegawai TPST Mulyoagung Bersatu).

Dengan adanya fasilitas yang memadai, TPST Mulyoagung Bersatu ini mulai mengoperasikan pengelolaan sampah 3R Berbasis Masyarakat. Total biaya yang diperlukan untuk membangun TPST mencapai  $\pm 1,4$  Miliar Rupiah. Dana tersebut diantaranya berasal dari:

- 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar  $\pm 100$  Juta Rupiah
- 2) APBN sebesar  $\pm 1,2$  Miliar Rupiah
- 3) APBD Kabupaten Malang sebesar  $\pm 100$  Juta Rupiah

Lahan yang digunakan untuk membangun TPST Mulyoagung Bersatu adalah tanah kas desa dengan luas kurang lebih  $4000 \text{ m}^2$ . Dana dari PNPM Mandiri digunakan untuk membangun pagar tembok TPST seluas  $2000 \text{ m}^2$  dan APBD Kabupaten Malang digunakan untuk membangun tembok TPST juga

dengan ukuran 3 m x 100 m pada bagian sebelah Barat. Sedangkan dari APBN digunakan untuk membangun hangar baja, kantor, dan gudang, pos keamanan, tossa, mesin penggiling, mesin ayakan.

Pada tahun 2010, TPST Mulyoagung Bersatu telah resmi berdiri pada bulan Desember 2010 dan mulai beroperasi. Pada awal beroperasinya, KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu yang pada struktur kepengurusannya dipimpin oleh satu orang ketua dengan dibantu oleh 2 staff sebagai sekretaris dan bendahara serta didukung oleh satu staff pembantu yakni sebagai staff operasional guna memperlancar seluruh proses administrasi dan keuangan yang ada pada TPST 3R Mulyoagung Bersatu yang kini dalam kinerja operasionalnya selain tenaga staff diatas telah mempekerjakan 74 pegawai yang terbagai atas beberapa tugas dan kewajiban yang diantaranya:

- a) 22 Orang sebagai petugas angkut sampah,
- b) 3 Orang sebagai petugas penjaga keamanan,
- c) 49 Orang sebagai tenaga operasional

Keseluruhan pegawai yang dipekerjakan oleh TPST Mulyoagung Bersatu berasal dari warga Desa Mulyoagung sendiri.

Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di TPST Mulyoagung Bersatu adalah sistem pengelolaan sampah 3R dengan sampah tercampur. Artinya, sampah yang berasal dari rumah warga dalam kondisi belum terpilah (tercampur).

Proses Kegiatan dari Sistem Pengelolaan Sampah 3R dengan Sampah Tercampur ini adalah:

- 1) Sampah dari rumah dalam kondisi belum terpilah (tercampur). Sampah selanjutnya dibawa ke Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dengan gerobak sampah atau motor sampah.
- 2) Di TPS sampah akan dipilah menurut jenisnya yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah residu.
- 3) Sampah anorganik akan selanjutnya dikumpulkan dan dijual.
- 4) Sampah organik yang telah dipilah selanjutnya dilakukan proses pengomposan.
- 5) Sampah residu ditampung dan kemudian diangkut ke TPA.

Proses pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu secara umum terdiri dari tiga tahap, yaitu : pengangkutan, pemilahan, pengomposan. Pengangkutan sampah dari rumah warga dimulai pada jam 6 pagi. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2 Jadwal Pengelolaan Sampah TPST Mulyoagung Bersatu**

Waktu (WIB)	Keterangan
06.00 – 08.00	Pengangkutan sampah
08.00 – 10.00	Pemilahan sampah
10.00 – 12.00	Pemilahan sampah dan pengomposan
12.00 – 13.00	Istirahat
13.00 – 15.00	Pemilahan sampah dan pengomposan
15.00 – 16.00	Packing lapak dan pengumpulan residu



16.00 – 17.00	Pengangkutan residu ke TPA
17.00	Pulang

*Sumber : observasi peneliti*

Proses pengangkutan sampah dari rumah warga dilakukan pada pukul 6 pagi. Setelah semua sampah dari rumah warga dikumpulkan, kemudian sampah dipilah. Dalam proses pemilahan, pengomposan juga dilakukan. Setelah proses pemilahan dan pengomposan selesai, dilakukan *packing* terhadap lapak dan pengumpulan residu sampah dimana residu tersebut akan diangkut ke TPA. Setelah semuanya selesai, hangar TPST dibersihkan dari sisa-sisa sampah.

Proses kerja TPST Mulyoagung Bersatu berorientasi pada prinsip pengelolaan 3R yakni *reduce, reuse, recycle* agar dapat tercapainya program *zero waste* yaitu pemanfaatan limbah sampah secara maksimal pada masa mendatang. Prinsip-prinsip pengelolaan sampah menurut PP No. 81 Tahun 2012 yaitu menerapkan strategi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk mencapai hal tersebut, TPST Mulyoagung Bersatu menerapkan pembagian proses kerja yang terdiri dari beberapa zona dalam proses pengelolaan sampah. Alur yang dimulai dari pengangkutan sampah hingga proses pengomposan sampah dengan pemasarannya dalam TPST Mulyoagung Bersatu disebut dengan proses kerja TPST Mulyoagung Bersatu Divisi I. Berikut ini merupakan beberapa tahapan dalam proses kerja TPST Mulyoagung Bersatu Divisi I.

### 1) Pengangkutan Sampah dari Rumah Warga

Awal dari proses kerja pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu adalah mengumpulkan sampah dari rumah warga sampah diambil setiap pagi hari di seluruh area permukiman penduduk Desa Mulyoagung dan sekitarnya. Pengangkutan sampah ini dilakukan oleh kurang lebih 12 petugas angkut sampah dengan menggunakan sarana yang dimiliki oleh pihak TPST Mulyoagung Bersatu.

**Tabel 3 Sarana Pengangkut Sampah TPST Mulyoagung Bersatu**

Sarana	Jumlah	Keterangan
Motor Sampah	7 Unit	1 Unit tidak berfungsi
Gerobak Sampah	5 Unit	Semua berfungsi

*Sumber: observasi peneliti*

TPST Mulyoagung bersatu memiliki 7 unit kendaraan motor sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah yang beralokasi jauh dari TPST. Satu unit motor sampah dalam kondisi rusak/tidak berfungsi. Gerobak sampah berjumlah 5 unit yang digunakan untuk mengangkut sampah yang lokasinya tidak jauh dari TPST.



**Gambar 10 Motor pengangkut sampah**

*Sumber : dokumentasi peneliti*

Setelah semua sampah diangkut dan dikumpulkan di TPST Mulyoagung Bersatu, kemudian dilakukan pembongkaran. Sampah dibongkar dan didiamkan sejenak sebelum memasuki tahap selanjutnya. Hal ini dilakukan agar sampah yang masih basah dan berbau menyengat bisa sedikit mengering sehingga baunya tidak terlalu menyengat saat dilakukan pemilahan oleh petugas pemilah sampah.

TPST Mulyoagung Bersatu tidak hanya melayani pengangkutan sampah dari Desa Mulyoagung saja, tetapi juga dari daerah lain yang mengajukan permohonan agar sampahnya diangkut ke TPST Mulyoagung Bersatu. Untuk sampah yang berasal dari luar Desa Mulyoagung dikenakan retribusi.

**Tabel 4 Lokasi Pengangkutan Sampah TPST Mulyoagung Bersatu**

<b>No.</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Produksi Sampah (M<sup>3</sup>/Hari)</b>	<b>Penduduk Terlayani (KK)</b>
1	Mulyoagung	33	4000
2	Landungsari	3,5	450
3	Tegal Gondo	3,5	400
4	Dadap Rejo	3	250
5	Sumber Sekar	2	250
	Jumlah	45	5350

*Sumber: dokumen TPST Mulyoagung Bersatu*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa TPST Mulyoagung Bersatu melayani pengangkutan smapah dari berbagai daerah, antara lain: Desa Mulyoagung, Landungsari, Tegal Gondo, Dadap Rejo, dan Sumber Sekar. Produksi sampah yang diangkut setiap harinya oleh TPST Mulyoagung Bersatu mencapai 45 m<sup>3</sup>/hari dengan produksi sampah paling tinggi di Desa Mulyoagung sebesar 33 m<sup>3</sup>/hari. Penduduk yang terlayani oleh pengangkutan sampah yang dilakukan oleh TPST Mulyoagung Bersatu mencapai 5350 KK dengan penduduk terlayani paling banyak di Desa Mulyoagung sebesar 4000 KK.

## 2) **Pemilahan Sampah**

Proses selanjutnya adalah pemilahan sampah. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan. Atau sifat sampah. Pemilahan sampah ini dilakukan oleh ± 20 orang petugas pemilah sampah. Sampah yang telah terkumpul akan dipilah untuk dikelompokkan sesuai

dengan jenisnya agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomis terpisah dari jenis sampah yang tidak memiliki guna maupun nilai ekonomis. Selama melakukan kegiatan pemilahan sampah, semua petugas pemilah memakai masker dan sarung tangan. Pemakaian masker dan sarung tangan diperlukan agar kesehatan petugas pemilah sampah terjaga.



**Gambar 11 Pemilahan Sampah TPST Mulyoagung Bersatu**

*Sumber: dokumentasi peneliti*

Proses pemilahan sampah ini menghasilkan enam macam jenis sampah, antara lain:

**a. Kaca/Beling**

Limbah kaca dibedakan karena limbah kaca masih memiliki nilai ekonomis. Hal ini dikarenakan limbah kaca masih dapat dimanfaatkan tanpa harus menjalani proses daur ulang yakni untuk dijadikan kerajinan tangan, disisi lain bila melalui proses daur ulang limbah kaca dapat

dijadikan sebagai bahan baku perhiasan yakni melalui proses pelelehan pacahan kaca. Oleh karena itu limbah kaca telah terpisah dengan limbah lain dengan melalui proses *packing* limbah kaca siap untuk dijual ketempat penadah daur ulang limbah kaca.

**b. 12 Macam Lapak Keras**

Lapak keras pada jenis limbah ini yang dimaksud adalah limbah gelas dan botol air mineral, bak berwarna, bak warna hitam, mika plastik, PLS putihan, kaleng, alumunium dari kaleng minuman, alumunium dari peralatan dapur, mika keras dari CD, besi A dan B, limbah lampu TL akan bernilai ekonomis bila diual untuk didaur ulang. Jadi dengan melalui proses *packing* maka 12 macam limbah ini siap untuk dijual ke penadah limbah lapak keras.

**c. 3 Macam Lapak Kertas**

3 macam jenis lapak kertas pada kelompok ini terdiri dari limbah kertas kardus, limbah kertas duplek, dan limbah kertas HVS yang tentunya masih memiliki nilai ekonomis. Limbah kertas akan bermanfaat setelah melalui proses daur ulang oleh industri kertas yang hasilnya adalah kertas-kertas baru maupun kardus-kardus baru. Selain itu limbah kertas jikan tanpa melalui proses daur ulang oleh industri kertas juga dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan seperti pembuatan kerajinan topeng. Oleh karena itu limbah kertas yang telah dikumpulkan dan disendirikan dengan yang



lain dengan melalui proses *packing* limbah kertas siap untuk dijual ke penadah limbah kertas.

#### **d. 2 Macam Lapak Plastik**

2 jenis lapak plastik yang diantaranya adalah limbah plastik tas kresek dan limbah plastik putih (plastik kantong) dikumpulkan tersendiri dengan maksud untuk dijual kembali ke penadah daur ulang limbah plastik agar memiliki nilai ekonomis, karena limbah plastik yang merupakan sampah anorganik atau tidak dapat untuk berbau dengan alam, pada sisi ekonominya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini dikarenakan lapak plastik dapat didaur ulang untuk dijadikan beraneka macam benda yang berbahan plastik baik itu mainan anak, bak atau kaleng mandi, serta peralatan kebutuhan lain oleh perusahaan plastik. Jadi limbah plastik yang telah dikumpulkan dengan proses *packing* akan dijual ke penadah limbah plastik untuk didaur ulang.

#### **e. Limbah Nasi**

Limbah akan dikumpulkan pada proses *packing*, limbah nasi (limbah bekas makanan) ini memiliki nilai ekonomis bila dijual ke peternak. Dan hal ini TPST Mulyoagung bersatu bekerja sama dengan peternak babi, ayam, serta angsa agar mau untuk membeli limbah nasi sebagai makanan dari hewan yang ditenak.



**f. Memilah Kompos dan Residu**

Jenis limbah yang terakhir yakni campuran antara limbah yang masih dapat diolah menjadi kompos dan limbah residu akan melalui tahapan pemilahan kembali agar menghasilkan dua jenis limbah yakni limbah yang dapat diolah menjadi kompos dan limbah yang tidak dapat diolah.

Setelah proses pemilahan dilakukan, akan menghasilkan jenis limbah campuran antara limbah yang masih dapat diolah menjadi kompos dan residu. Oleh karena itu untuk memisahkan kedua jenis limbah ini maka dilakukan kembali proses pemilahan oleh petugas pemilah TPST Mulyoagung Bersatu. Hasil dari proses pemilahan kedua ini akan menghasilkan dua kegiatan yang berbeda, yaitu:

**a) Pengangkutan Residu ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)**

Untuk residu (limbah yang tidak dapat diolah menjadi kompos) dan limbah yang tidak memiliki nilai guna akan diangkut dengan menggunakan dump truck untuk dibawa ke TPA Randu Agung. Dalam melaksanakan kegiatan ini pihak TPST Mulyoagung Bersatu bekerjasama dengan UPTD Singosari. Tetapi karena akses jalan menuju ke TPA Randu Agung rusak, maka residu dialihkan untuk dibuang ke TPA Talang Agung beralokasi di Kepanjen.

b) Mempersiapkan Limbah untuk Proses Pengomposan

Untuk limbah yang masih dapat diolah untuk dijadikan pupuk kompos maka akan disiapkan oleh petugas pemilah di area proses awal dari produksi pupuk kompos yaitu proses pengomposan.

3) **Pengomposan Sampah**

Proses yang terakhir adalah pengomposan sampah. Pengomposan adalah sebuah proses pembusukan limbah sampah selama kurang lebih 25 hari yang dilakukan oleh kurang lebih 5 orang petugas komposting TPST Mulyoagung Bersatu. Hal ini dilakukan agar limbah menjadi busuk dan kering sebelum diolah menjadi pupuk kompos. Dalam proses komposting ini petugas komposting TPST Mulyoagung Bersatu juga mengambil setiap belatung yang ada di limbah sampah untuk dijadikan sebagai makanan ikan. Dari proses komposting ini menghasilkan dua macam jenis limbah sampah yang sama-sama memiliki nilai guna yakni:

a) Belatung Kompos

Selain hanya mengolah sampah, TPST Mulyoagung Bersatu juga berusaha untuk memanfaatkan lahan yang dimiliki sekitar area TPST yakni dengan membudidayakan ikan. Dengan hasil lebih dari proses komposting yang berupa belatung, maka belatung yang telah terkumpul akan dijadikan sebagai makanan ikan pada budidaya ikan di TPST Mulyoagung Bersatu. Selain itu manfaat dari pengambilan belatung dari sampah adalah berguna untuk mengurangi jumlah populasi lalat di area TPST Mulyoagung Bersatu.



**Gambar 12 Budidaya Kolam Ikan TPST Mulyoagung Bersatu**

*Sumber : dokumentasi peneliti*

**b) Limbah Sampah yang Telah Membusuk dan Kering**

Limbah sampah yang telah membusuk dan mengering melalui proses komposting maka akan dipersiapkan pada tahapan selanjutnya dalam proses pembuatan pupuk kompos. Dalam proses pengomposan limbah sampah yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu, dilakukan beberapa tahapan untuk membuat kompos. Tahapan ini harus dilakukan secara benar agar mendapatkan kualitas kompos yang baik. Tahapan tersebut antara lain:

**1) Penerimaan dan pembongkaran sampah**

Sampah dari sumber sampah biasanya dikumpulkan dan dibawa ke instalasi pengomposan sampah dengan gerobak motor atau gerobak sampah. Sampah tidak langsung di proses pada area pemrosesan, akan tetapi dibongkar di area penerimaan.

## 2) Pencacahan sampah organik

Setelah sampah dibongkar di area penerimaan, kemudian dibawa ke area pemilahan. Pemilahan dilakukan secara manual untuk memilah antara sampah organik dan dan sampah anorganik. Sampah anorganik dikumpulkan dan dikemas untuk dijual ke pengumpul barang bekas. Sampah residu dikumpulkan dan dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk diangkut ke TPA oleh Dinas Kebersihan. Sampah organik yang berbentuk besar dengan ukuran panjang dan lebar lebih dari 4 cm dicacah.

## 3) Pengomposan:

### a) **Penyusunan tumpukan sampah organik pada lajut yang ditentukan**

Sampah organik yang sudah terpilah dibawa ke area pengomposan. Sampah organik dicampur dan ditumpuk sesuai dengan metode yang digunakan. Tumpukan yang sudah terbentuk diberi tanda atau label yang berisi informasi mengenai waktu pembentukan tumpukan.

### b) **Pembalikan tumpukan satu kali seminggu**

Secala berkala, tumpukan sampah dibalik 1 atau 2 kali seminggu secara manual. Pembalikan tumpukan dapat dilakukan dengan memindahkan tumpukan ke tempat berikutnya. Waktu pembalikan dicatat dan tumpukan yang sudah dilakukan pembalikan diberi tanda tanggal pembalikan.

**c) Penyiraman dan pengukuran suhu tumpukan**

Tumpukan sampah disiram secara rutin untuk menjaga kelembapan. Penyiraman dilakukan setelah pembalikan tumpukan. Penyiraman tumpukan dilakukan sedemikian rupa sehingga tumpukan tidak terlalu basah yang dapat menyebabkan proses pengomposan menimbulkan bau. Kelembapan yang ideal sekitar 50%. Tumpukan yang sudah berumur 5 minggu tidak lagi dilakukan penyiraman.

**d) Penggilingan**

Produk kompos matang dari area pengomposan dipanen dan diangkut ke tempat penggilingan kompos untuk di giling. Limbah sampah yang telah melalui proses komposting akan digiling dengan menggunakan mesin giling tipe CC800 milik TPST Mulyoagung Bersatu agar limbah sampah menjadi hancur.

**e) Pengayakan**

Produk kompos dari area penggilingan diangkut ke tempat pengayakan kompos untuk disaring atau diayak yang dapat dilakukan secara manual atau mekanis. Produk kompos didiamkan dulu sehingga tidak terlalu lembab sehingga mudah diayak. Produk kompos halus dapat langsung dikemas sedangkan kompos kasar dikembalikan ke tumpukan kompos yang baru.





**Gambar 13 Pengayakan Kompos TPST Mulyoagung Bersatu**

*Sumber: dokumentasi peneliti*

#### **f) Pengemasan**

Kompos halus dikemas ke dalam kantong. Diberi label yang berisi informasi tentang nama kompos, jenis bahan baku, produsen kompos, kandungan kimia dan kegunaannya untuk tanaman. Kemasan kompos disimpan dalam ruang penyimpanan tertutup dan kering. Kompos dijual dengan harga 600 Rupiah/Kilogram. Dalam satu kantong berisi 25 Kilogram Kompos. Dalam penjualan kompos ini pegawai TPST Mulyoagung Bersatu bisa mendapatkan pupuk kompos secara gratis seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna selaku Staff Administrasi TPST Mulyoagung Bersatu:

“iya mbak, jadi disini kalau untuk pegawainya tidak usah membayar untuk mengambil hasilnya yang sudah diolah. Tinggal ambil-ambil saja mbak. Karena TPST ini awalnya kan dibangun juga untuk membantu perekonomian warga Mulyoagung ini mbak.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Ibu Ratna, Staff Administrasi KSM TPST Mulyoagung Bersatu).



**Gambar 14 Pengemasan Kompos TPST Mulyoagung Bersatu**

*Sumber: dokumentasi peneliti*

Di TPST Mulyoagung Bersatu, proses pengomposan menggunakan sistem *Open Windrow*. Sistem *Open Windrow* adalah proses pembuatan kompos yang paling murah dan sederhana. Bahan baku kompos ditumpuk memanjang dengan 7 tumpukan. Tinggi tumpukan 0,6 sampai 1 meter dengan lebar 2-5 meter. Sistem ini memanfaatkan sirkulasi udara secara alami. Optimalisasi lebar, tinggi, dan panjang tumpukan sangat dipengaruhi oleh keadaan bahan baku, kelembapan ruang pori, dan sirkulasi udara untuk mencapai bagian tengah tumpukan bahan



baku. Idealnya adalah pada tumpukan bahan baku ini dapat melepaskan panas, untuk mengimbangi pengeluaran panas yang ditimbulkan sebagai hasil proses dekomposisi bahan organik oleh mikroba.

#### **b. Pendanaan**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST meliputi:

- 1) Kebutuhan biaya intervensi sarana dan prasarana
- 2) Kebutuhan biaya operasi pengumpulan sampah serta operasional TPS dan pemeliharaan sarana/prasarana.
- 3) Kebutuhan biaya investasi dan operasi tersebut sebaiknya dipenuhi dengan perhitungan iuran warga perbulan yang besarnya dimusyawarahkan.
- 4) Insentif yang didapat adalah berupa hasil penjualan material daur ulang dan produk kompos serta penjualan bibit tanaman yang digunakan untuk kepentingan sosial warga atau meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Di TPST Mulyoagung Bersatu, pembiayaan biaya operasional TPST didapatkan dari hasil iuran warga dan hasil penjualan lapak serta pupuk kompos.

Hasil dari penjualan lapak dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 5 Penjualan Lapak TPST Mulyoagung Bersatu**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>HARGA</b>	<b>KET</b>
1	Duplek	Rp 750	/ kg
2	CD Buram	Rp 1.400	/ kg
3	HVS	Rp 2.000	/ kg
4	Sak Semen	Rp 1.700	/ kg
5	Kardus Bagus	Rp 1.700	/ kg
6	Kardus Biasa	Rp 1.100	/ kg
7	Mitasi / Banner	Rp 600	/ kg
8	Kebo	Rp 500	/ kg
9	Mantel	Rp 600	/ kg
10	Omplong	Rp 500	/ kg
11	Besi A	Rp 700	/ kg
12	Besi B	Rp 1.700	/ kg
13	Keras Kaca	Rp 2.600	/ kg
14	Mainan	Rp 400	/ kg
15	Paralon	Rp 1.000	/ kg
16	Bak Hitam	Rp 900	/ kg
17	Bak Warna	Rp 2.800	/ kg
18	Putihan	Rp 3.500	/ kg
19	Kaset CD	Rp 1.400	/ kg
20	Koran	Rp 1.300	/ kg
21	Orson	Rp 100	/ biji
22	Botol Saos	Rp 50	/ biji
23	Sprite	Rp 150	/ biji
24	Minyak GPU	Rp 25	/ biji
25	Kayu Putih	Rp 300	/ biji
26	Lampu Philips	Rp 500	/ biji
27	Aki	Rp 10.000	/ biji
28	Gembos	Rp 250	/ kg
29	Tulang	Rp 800	/ kg
30	Ban	Rp 200	/ biji
31	Tembaga	Rp 30.000	/ kg
32	Kuningan	Rp 20.000	/ kg
33	Cas HP	Rp 4.000	/ kg
34	Arloji	Rp 10.000	/ kg
35	Limbah Nasi	Rp 3.000	/ tong
36	Pupuk Organik	Rp 500	/ kg

37	Beling Putih	Rp	250	/ kg
38	Beling Coklat	Rp	125	/ kg
39	Beling Hijau	Rp	25	/ kg
40	Beling Keramik	Rp	25	/ kg
41	Bintang	Rp	600	/ biji
42	Kecap B	Rp	400	/ biji
43	Kecap K	Rp	125	/ biji
44	Topi Miring	Rp	1.000	/ biji
45	Madu	Rp	150	/ biji
46	Minyak Tawon K	Rp	200	/ biji
47	Minyak Tawon B	Rp	25	/ biji
48	Kaca	Rp	25	/ kg
49	Minyak Kemiri	Rp	100	/ biji
50	Anggur Merah	Rp	350	/ biji
51	HP	Rp	2.000	/ biji
52	Mika	Rp	50	/ kg
53	Sterofoam	Rp	50	/ kg
54	Kertas Bungkus Nasi	Rp	50	/ kg
55	Sendok Bagus	Rp	20.000	/ kg
56	Modem	Rp	500	/ biji
57	Kartu (SIM) / Memory	Rp	20.000	/ kg
58	RAM Memory	Rp	750	/ biji

*Sumber : dokumen TPST Mulyoagung Bersatu*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tembaga mempunyai harga jual paling tinggi yaitu 30.000 Rupiah/Kilogram. Dan untuk Minyak Tawon B, Kaca, Beling Hijau, Beling Keramik, dan Minyak GPU mempunyai harga jual paling rendah yakni 25 Rupiah. Pembeli lapak yang ingin memiliki lapak dari TPST Mulyoagung Bersatu datang sendiri ke lokasi TPST Mulyoagung Bersatu.

Selain dari hasil penjualan lapak dan pupuk kompos. Penerimaan TPST Mulyoagung Bersatu didapatkan dari hasil iuran warga. Sebelum dibangun TPST sudah ada iuran warga dari Desa Mulyoagung untuk masalah sampah. Iuran saat

ini hanya melanjutkan iuran yang terdahulu. Biasanya iuran untuk warga bekisar antara 5.000 Rupiah sampai dengan 12.000 Rupiah setiap bulan. Berikut adalah iuran sampah di TPST Mulyoagung Bersatu:

**Tabel 6 Iuran Sampah TPST Mulyoagung Bersatu**

No.	Jenis	Iuran (Rupiah/Bulan)
1	Pondok pesantren	500.000
2	Rumah usaha hotel	400.000
3	Rumah usaha catering	300.000
4	Rumah usaha rumah makan	200.000
5	Rumah usaha perkantoran/sekolah	50.000
6	Rumah usaha swalayan	50.000
7	Rumah usaha kos	30.000
8	Rumah usaha warung nasi	20.000
9	Pedagang kaki lima	15.000
10	Rumah tangga	5.000-12.000

*Sumber: dokumen TPST Mulyoagung Bersatu*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa iuran paling tinggi adalah Pondok Pesantren yaitu sebesar minimal 500.000 Rupiah/Bulan dengan volume sampah 1 m<sup>3</sup> setiap harinya. Dan terakhir yang paling rendah adalah iuran rumah tangga sebesar 5.000-12.000 Rupiah/Bulan. Iuran sampah tersebut mulai disetorkan ke Bendahara KSM TPST Mulyoagung Bersatu mulai tanggal 1 dan paling lambat tanggal 28 setiap bulan oleh ketua RT/RW. KSM TPST Mulyoagung Bersatu kemudian memberikan laporan hasil iuran sampah kepada Kepala Desa

Mulyoagung. Dalam pembayaran iuran sampah ini, biasanya tidak semua masyarakat sudah membayar setiap bulannya. Selain itu transparansi ketua RT/RW dalam memberikan laporan pembayaran iuran sampah di daerahnya masih rendah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratna selaku Staff Administrasi TPST Mulyoagung Bersatu:

“kadang-kadang ada warga yang belum bayar juga sih mbak. Ya mau gimana lagi, yang ngurus ya ketua RT/RW nya. Itupun kalau setor iuran biasanya Cuma ngasih uang gitu aja. Jadi gak ada laporannya. Warga yang sudah bayar berapa yang belum bayar berapa kita tidak tahu mbak. Meskipun ada juga yang pakai laporan. (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Ibu Ratna, Staff Administrasi KSM TPST Mulyoagung Bersatu).

Kendala yang sering dialami dalam pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat ini adalah masalah dalam pembiayaan operasional pengelolaan sampah. Hal ini juga terjadi di TPST Mulyoagung Bersatu. Biaya operasional pengelolaan sampah yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat dari hasil iuran warga dan penjualan lapak serta pupuk kompos.

**Tabel 7 Laporan Global Pemasukan dan Pengeluaran Rata-Rata Setiap Bulan TPST Mulyoagung Bersatu**

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)
I	Penerimaan	
	1. Iuran warga	22.050.500
	2. Hasil lapak dan pupuk	28.450.000
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>50.500.500</b>

II	Pengeluaran	
	1. Barang modal	6.420.000
	2. Gaji pegawai	41.070.000
	3. Operasional umum	3.454.700
	4. BBM	3.548.000
	5. Perawatan	1.670.000
	6. Sosial	400.000
	7. ATK	225.000
	<b>Total Pengeluaran</b>	<b>56.787.700</b>

*Sumber: dokumen TPST Mulyoagung Bersatu*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total penerimaan rata-rata setiap bulan yang dimiliki oleh TPST Mulyoagung Bersatu adalah sebesar 50.500.500 Rupiah. Penerimaan tersebut berasal dari iuran warga dan jumlah hasil penjualan lapak dan pupuk. Total penerimaan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan total pengeluaran rata-rata setiap bulan sebesar 56.787.700 Rupiah. Pengeluaran tersebut digunakan untuk pembiayaan barang modal, gaji pegawai, operasional umum, BBM, perawatan, sosial, dan juga keperluan ATK. Untuk mengatasi masalah pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan tersebut, pihak KSM TPST Mulyoagung Bersatu mempunyai sebuah solusi yaitu dengan melakukan pinjaman ke rekanan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna selaku Staff Administrasi TPST Mulyoagung Bersatu:

”selama ini penerimaan yang kami dapat masih belum seimbang dengan pengeluaran untuk operasional. Meskipun begitu pengelolaan sampah di TPST harus tetap jalan. Solusinya ya melakukan pinjaman ke rekanan terlebih dahulu. Biasanya ke pembeli lapak. Jadi kita meminjam uang di rakanan terus kalau rekanan mengambil hasil lapak ya tinggal dikasih aja. Ibaratnya barter gitu mbak tapi kita meminjam uangnya dulu.” (wawancara

pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Ibu Ratna, Staff Administrasi KSM TPST Mulyoagung Bersatu).

Pinjaman ke rekanan yang dilakukan oleh KSM TPST Mulyoagung Bersatu dimaksudkan untuk menutup kurangnya biaya operasional TPST dalam mengelola sampah. Apabila hal ini tidak dilakukan maka kegiatan pengelolaan sampah yang ada di TPST akan terhenti. Jika hal ini terjadi maka akan mempengaruhi penanganan masalah sampah yang ada di Desa Mulyoagung dan sekitarnya. Pinjaman ke rekanan biasanya dilakukan kepada pihak-pihak yang membeli lapak di TPST Mulyoagung Bersatu.

Dari penyajian data diatas tentang pendanaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam pendanaan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh TPST Mulyoagung Bersatu. Kendala yang terjadi adalah biaya operasional pengelolaan sampah yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat dari hasil iuran warga dan penjualan lapak serta pupuk kompos. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak KSM TPST Mulyoagung Bersatu melakukan pinjaman ke rekanan.

### **c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penanganan sampah tidak cukup hanya oleh pemerintah, tetapi juga harus melibatkan pihak-pihak swasta dan masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.



Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk aktif dalam hal pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini. Adanya peran aktif masyarakat untuk melaksanakan program TPST 3R terutama yang berkaitan dengan perubahan perilaku dan budaya memilah sampah sejak dari sumbernya merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan proses pengelolaan yang sudah terbina.

Bentuk peran aktif masyarakat Desa Mulyoagung dalam program TPST 3R dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam membangun TPST Mulyoagung Bersatu. Meskipun masyarakat Desa Mulyoagung tidak terlibat dalam pembangunan hangar, kantor, serta gedung TPST, pembangunan tembok dan akses jalan masuk ke TPST Mulyoagung Bersatu dilakukan oleh warga Desa Mulyoagung. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna selaku Staff Administrasi TPST Mulyoagung Bersatu:

“kita tidak diberi tunai mbak, jadi langsung kerja seperti ini. Jadi PNPM ini juga dilaksanakan oleh masyarakat. Terus untuk yang APBN sudah proyek kan yang mengerjakan. Kita tahunya sudah paket seperti ini. Kalau pagar dan jalan masuk itu warga sendiri mbak melalui kerja bakti yang dilakukan setiap minggunya. Dulu jalan masuk ini belum ada, masih sawah itu.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Ibu Ratna, Staff Administrasi KSM TPST Mulyoagung Bersatu).

Sebelum TPST Mulyoagung Bersatu dibangun, dulu lahan TPST adalah berupa sawah. Kemudian tahun 2008 pembangunan TPST mulai dilakukan. Pembangunan pagar dan jalan masuk ke TPST dilakukan oleh masyarakat Desa Mulyoagung dengan cara kerja bakti. Dana yang digunakan adalah dari PNPM dan APBD.

Bentuk partisipasi lain masyarakat Desa Mulyoagung dalam mendukung program TPST 3R dapat dilihat dari antusias masyarakat ketika dilakukan

sosialisasi oleh fasilitator. Fasilitator bertugas menggalang dan mandampingi masyarakat yang berminat melaksanakan penyelenggaraan TPST 3R Berbasis Masyarakat, bersama-sama mencari metode penyelesaian masalah sampah, menggali keinginan masyarakat, dan memberikan pelatihan serta pendampingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan TPST 3R Berbasis Masyarakat.

Meskipun partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam mendukung program TPST 3R ini cukup tinggi, penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang. Aspirasi masyarakat dapat berupa saran pendapat dan juga usulan-usulan. Masyarakat Desa Mulyoagung terkesan enggan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung ke TPST Mulyoagung Bersatu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu:

“sebenarnya ada, tapi jarang sekali warga yang datang kesini. Paling kalau ketemu diwarung itu tanya. Jarang sekali pokoknya yang datang kesini. Kayaknya warga itu agak canggung kalau kesini. Padahal kan lebih baik kalau langsung ngobrol disini sambil lihat-lihat desa.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Bapak Supadi, Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu).

Masyarakat Desa Mulyoagung sebenarnya memiliki saran pendapat maupun usulan-usulan terkait pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. Akan tetapi masyarakat Desa Mulyoagung tidak secara langsung menyampaikannya ke TPST. Masyarakat Desa Mulyoagung terlihat enggan masuk ke TPST Mulyoagung Bersatu. Padahal aspirasi masyarakat yang berupa saran pendapat maupun usulan-usulan sangat berguna bagi keberlanjutan dan pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program TPST 3R adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari perubahan bentuk perilaku masyarakat Desa Mulyoagung terhadap kebersihan sampah yang tidak lagi didasarkan pada keharusan kewajibannya, tetapi lebih didasarkan pada nilai kebutuhan. Masyarakat Desa Mulyoagung yang pada awalnya membuang sampah di Daerah Aliran Sungai Brantas, sekarang membaung sampahnya di TPST Mulyoagung Bersatu. Mereka sadar bahwa apabila sampah terus dibuang di Daerah Aliran Sungai Brantas akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Bentuk lain pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh TPST Mulyoagung Bersatu adalah dengan menggunakan tenaga kerja dalam pengelolaan sampah yang berasal dari masyarakat Desa Mulyoagung.

“pegawai kita saat ini 74 orang. semuanya adalah warga Desa Mulyoagung. Ada juga yang berasal dari daerah lain, tapi hanya sedikit. Mereka yang bekerja disini dulunya ibu rumah tangga dan ada juga pemulung yang ada di Sungai Brantas. Begitu TPST dibangun, mereka dipekerjakan disini.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Bapak Supadi, Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu).

Sebagian besar yang menjadi pegawai di TPST Mulyoagung Bersatu adalah masyarakat Desa Mulyoagung yang dulunya menjadi ibu rumah tangga dan ada juga yang menjadi pemulung pada saat sampah masih dibuang di Daerah Aliran Sungai Brantas. Pada saat TPST Mulyoagung Bersatu dibangun, mereka dipekerjakan sebagai tenaga kerja dalam mengelola sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. Tidak semua yang mejadi pegawai di TPST Mulyoagung Bersatu

adalah warga Desa Mulyoagung tetapi ada juga yang berasal dari desa lain di sekitar Desa Mulyoagung.

Dengan adanya TPST Mulyoagung juga meningkatkan perekonomian Desa Mulyoagung. khususnya pegawai TPST Mulyoagung Bersatu dan juga rumah usaha warung yang ada di TPST. Dengan demikian TPST Mulyoagung bersatu mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Mulyoagung. seperti yang disampaikan oleh Bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu:

“kalau ekonomi warga ya itu, warung-warung di depan kan laris itu. Kalau jam istirahat kan pegawai banyak yang makan disitu.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Bapak Supadi, Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu).

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurjati selaku pegawai TPST Mulyoagung Bersatu:

“ya alhamdulillah mbak cukup buat sehari-hari. Saya sudah disini sejak tahun 2012 mbak. Kalau kerja sampai malam ya dapat uang lembur. Kalau tidak masuk ya potong gaji mbak.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Ibu Nurjati, Pegawai KSM TPST Mulyoagung Bersatu).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Miseni selaku pegawai TPST Mulyoagung Bersatu:

“saya sudah lama disini mbak sejak TPST dibangun. Saya termasuk yang paling lama. Kalau untuk perekonomian ya alhamdulillah cukup mbak buat saya sama keluarga. Kalau lembur ya dapat uang tambahan mbak tapi kalau tidak masuk dipotong gaji. Terus kalau liburan gitu biasanya kita ada rekreasi gitu mbak ke Jogja, ke Cangar.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Ibu Miseni, Pegawai KSM TPST Mulyoagung Bersatu).

Dari penyajian data diatas tentang partisipasi dan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyaakat Desa Mulyoagung dalam perencanaan dan pembangunan TPST cukup tinggi. Akan tetapi partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam penyampaian aspirasi dan pendapat masih kurang. Dalam hal pemberdayaan, TPST Mulyoagung Bersatu menggunakan tenaga kerja dalam pengelolaan sampah yang berasal dari masyarakat Desa Mulyoagung sendiri.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program TPST**

### **3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu**

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **1) Komitmen Pengurus KSM TPST Mulyoagung Bersatu dalam Mengelola Sampah**

Komitmen pengurus KSM TPST Mulyoagung Bersatu dalam mengelola sampah di Desa Mulyoagung dan sekitarnya merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan TPST. KSM adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial dan bergerak di bidang pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung.

Pengurus KSM yang memiliki tanggungjawab terhadap manajemen TPST Mulyoagung Bersatu mengerahkan kapasitasnya peduli lingkungannya. Kondisi demikian membawa ketua KSM dalam memimpin organisasinya untuk jujur, adil, dan disiplin serta tegas dalam menetapkan aturan. Gaya kepemimpinan KSM yang seperti itu merupakan upaya yang ditempuh agar masyarakat yang menjadi pengurus KSM lainnya memiliki komitmen dan keteguhan dalam mengelola

TPST mulyoagung Bersatu. Disamping itu, pengurus KSM juga harus memiliki sikap keterbukaan dan transparansi antar pengurus dan kepada siapapun bagi yang ingin mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung.

Selain komitmen pengurus KSM, komitmen pegawai TPST Mulyoagung Bersatu juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan TPST Mulyoagung Bersatu dalam mengelola sampah. Apabila pegawai ogah-ogahan dalam mengelola sampah, baik itu dalam kegiatan pengangkutan, pemilahan, maupun pengomposan, TPST Mulyoagung Bersatu tidak akan mampu untuk menutupi pengeluaran biaya operasional TPST yang tinggi.

## **2) Sarana dalam Pengelolaan Sampah yang Memadai**

Infrastruktur dan sarana prasarana merupakan kebutuhan utama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. Tanpa adanya infrastruktur dan sarana prasarana yang baik, pengelolaan sampah tidak dapat beroperasi. Sarana yang dimiliki oleh TPST Mulyoagung Bersatu dalam pengelolaan sampah sangat memadai. Untuk kegiatan pengangkutan, pemilahan, dan pengomposan sampah. Untuk kegiatan pengangkutan sampah dari rumah warga, TPST Mulyoagung Bersatu mempunyai 7 unit motor sampah dan 5 unit gerobak sampah. Motor sampah digunakan untuk mengangkut sampah yang berlokasi jauh dari TPST, sedangkan gerobak sampah digunakan untuk mengangkut sampah yang lokasinya tidak jauh dari TPST. Dalam kegiatan pemilahan sampah, sarana yang digunakan oleh pegawai antara lain penggaruk sampah, keranjang sampah, masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Tidak semua



pegawai pemilah sampah TPST Mulyoagung Bersatu menggunakan masker dan sarung tangan pada waktu memilah sampah. Penggunaan masker dan sarung tangan diperlukan untuk menjaga kesehatan para pegawai pemilah sampah. Pengomposan dilakukan dengan menggunakan alat penggiling dan pengayak kompos. Alat untuk proses pengomposan semuanya berfungsi dengan baik. Dengan tersedianya sarana untuk mengelola sampah yang memadai, TPST Mulyoagung Bersatu dapat menjalankan kegiatan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat dengan baik.

#### **b. Faktor Penghambat**

##### **1) Biaya Operasional TPST Mulyoagung Bersatu yang Tinggi**

Kendala pada program TPST 3R secara umum di Kabupaten Malang adalah biaya operasional dalam pengelolaan sampah. Biaya operasional yang tinggi serta tidak seimbang dengan penerimaan akan menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna selaku Staff Administrasi TPST Mulyoagung Bersatu:

“ya gitu mbak, kendalanya di biaya. Itu kalau gak ada iuran yang masuk ya gak jalan. Intinya gini, iuran warga kalau banyak untuk biaya operasional kan gampang. Soalnya kan itu mandiri, gak boleh dibantu. Pengadaan sarana dan prasarana saja. Itu kuncinya mbak.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Ibu Ratna, Staff Administrasi KSM TPST Mulyoagung Bersatu).

Iuran warga merupakan sumber utama penerimaan TPST. Apabila iuran warga sedikit akan mempengaruhi pengelolaan sampah di TPS karena kurangnya biaya operasional. Dalam hal ini pihak swasta tidak boleh memberikan bantuan.



Bantuan yang bisa diberikan oleh pihak swasta hanya dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah.

TPST Mulyoagung Bersatu juga mengalami kendala dalam pembiayaan operasional TPST. Biaya operasional pengelolaan sampah yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat membuat TPST Mulyoagung harus mencari solusi untuk mengatasinya. Solusi yang dilakukan oleh pihak pengurus KSM TPST Mulyoagung Bersatu adalah dengan melakukan pinjaman ke rekanan. Rekanan disini adalah para pembeli lapak yang sudah berlangganan untuk mengambil dan membeli hasil dari TPST. Pinjaman ke rekanan menutup kurangnya biaya operasional TPST dalam mengelola sampah. Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan mempengaruhi penanganan masalah sampah sampah yang ada di Desa Mulyoagung.

## **2) Sampah dari Masyarakat yang Belum Terpilah**

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST Mulyoagung Bersatu adalah dengan sistem sampah tercampur. Artinya sampah masih belum terpilah. Sampah yang diangkut dari rumah warga selanjutnya dibawa ke tempat pengelolaan sampah dengan motor sampah atau gerobak sampah. Kemudian di TPS sampah dipilah sesuai dengan jenisnya yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Kegiatan pemilihan ini akan memerlukan waktu yang lama. Pada waktu kegiatan pemilahan dilakukan sampah terus datang sehingga menyebabkan proses pemilahan tidak benar-benar bersih. Pemilahan yang tidak bersih ini akan berpengaruh pada kualitas pupuk kompos yang

dihasilkan. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis dan/ atau sifat sampah.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 81 Tahun 2012 Mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu**

##### **a. Kebijakan, Strategi, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah meliputi: pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pengurangan sampah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Pasal 11 yaitu pengurangan sampah meliputi: pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Kebijakan mengenai pengelolaan sampah TPST ini juga diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Malang No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang juga mengatur mengenai pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Kebijakan mengenai Peraturan Desa Mulyoagung No. 2 Tahun 2012 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk menuju Desa Mulyoagung yang Bersih, Sehat, dan Bermutu juga mengatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah di Desa Mulyoagung. Jumlah timbulan sampah di Desa Mulyoagung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Dilihat dari tahun 2014 jumlah timbulan sampah sebesar 64 m<sup>3</sup>/hari. Pada Tahun 2015 meningkat sebesar 71 m<sup>3</sup>/hari. Tahun 2016 terjadi penurunan jumlah timbulan sampah sebesar 52 m<sup>3</sup>/hari. Dan pada Tahun 2017 menurun lagi menjadi 45 m<sup>3</sup>/hari.

Dengan adanya masalah dalam penangan sampah tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang perlu untuk membuat langkah atau tindakan untuk mengatasinya. Program TPST 3R Berbasis Masyarakat adalah solusi yang dipilih Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada selama ini. Program TPST 3R Berbasis Masyarakat adalah paradigma baru pengelolaan sampah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah. Konsep 3R yang diterapkan dalam program ini adalah dengan mengarahkan pada proses daur ulang sampah (*recycle*). Hal ini dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya karena adanya potensi pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan sekunder kegiatan industri seperti plastik, kertas, logam, gelas, dan lain-lain.

Untuk mendukung pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Malang telah membuat sebuah Peraturan Pemerintah

No. 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang merupakan peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk:

- 1) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 3) Menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengimplementasian Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang.

TPST Mulyoagung Bersatu merupakan salah satu wujud dari hasil implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di Desa Mulyoagung Kabupaten Malang. TPST yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2010 ini mampu mengelola sampah sebesar 45 m<sup>3</sup>/hari dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 5350 KK.

Implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan-kebijakan atau program-program akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat merupakan perwujudan dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan diimplementasikannya program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada di Desa Mulyoagung terutama untuk mengurangi timbulan sampah dimulai sejak dari sumbernya.

Dalam implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung tidak cukup hanya melibatkan pemerintah Kabupaten Malang saja, tetapi juga harus melibatkan pihak swasta dan juga masyarakat Desa Mulyoagung agar program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung, yang menjadi target group adalah masyarakat Desa Mulyoagung itu sendiri. Dengan adanya program tersebut diharapkan masyarakat Desa Mulyoagung mampu merubah pola pikir terhadap masalah sampah. Sampah yang sebelumnya dibuang ke daerah aliran Sungai Brantas bisa dibuang ke TPST Mulyoagung Bersatu. Dengan demikian pencemaran terhadap lingkungan yang ada di Desa Mulyoagung bisa berkurang. Unsur pelaksana dalam pengelolaan sampah program ini adalah KSM TPST Mulyoagung Bersatu. KSM TPST Mulyoagung Bersatu memiliki tugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Mulyoagung di bidang kebersihan lingkungan hidup.

#### **b. Pendanaan**

Pendanaan TPST Mulyoagung Bersatu terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan TPST berasal dari iuran warga dan hasil penjualan lapak dan pupuk kompos. Pengeluaran TPST digunakan untuk pembelian barang modal, gaji pegawai, operasional umum, biaya BBM, perawatan sarana, kegiatan sosial, dan pembelian ATK. Kendala yang dialami oleh TPST Mulyoagung Bersatu

dalam pendanaan adalah biaya operasional pengelolaan sampah yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat dari iuran warga dan penjualan lapak dan pupuk kompos. Untuk mengatasi masalah ini, KSM TPST Mulyoagung Bersatu mempunyai sebuah solusi yaitu dengan melakukan pinjaman ke rekanan. Pinjaman ke rekanan yang dilakukan oleh KSM TPST Mulyoagung Bersatu dimaksudkan untuk menutup kurangnya dana untuk biaya operasional TPST dalam mengelola sampah. Pinjaman biasanya dilakukan kepada pihak swasta yang membeli lapak ke TPST Mulyoagung Bersatu. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat sangat diperlukan. Penanganan sampah tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang, tetapi juga harus melibatkan masyarakat Desa Mulyoagung dan pihak swasta serta didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Apabila tidak ada keterlibatan pada pihak swasta dalam Program TPST 3R Berbasis Masyarakat ini, TPST Mulyoagung Bersatu akan mengalami kesulitan dalam pembiayaan operasional. Salah satu sumber penerimaan TPST Mulyoagung Bersatu adalah dari hasil penjualan lapak. Lapak ini dijual ke pihak swasta yang membutuhkan. Apabila tidak ada pihak swasta yang membeli lapak dari TPST Mulyoagung Bersatu, maka penerimaan TPST akan berkurang.

Terkait dengan pinjaman yang dilakukan kepada pihak swasta untuk menutup biaya operasional dalam pengelolaan sampah yang tinggi, KSM TPST Mulyoagung Bersatu harus memikirkan alternatif lain. Hal ini dikarenakan bahwa adanya kemungkinan bahwa pinjaman ke pihak swasta tersebut tidak bisa dilakukan selamanya. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan

menjual lapak yang diproduksi oleh TPST Mulyoagung Bersatu langsung ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. Saat ini penjualan lapak yang dilakukan oleh TPST adalah melalui pengumpul lapak. Dengan melakukan penjualan lapak langsung ke pabrik tanpa melalui perantara pihak ketiga (pengumpul lapak), akan meningkatkan keuntungan dari hasil penjualan lapak. Peningkatan keuntungan ini akan menambah penerimaan TPST. Bertambahnya penerimaan ini dapat digunakan untuk menutup biaya operasional dalam pengelolaan sampah yang tinggi. Yang menjadi masalah adalah biasanya pabrik memberikan target terhadap lapak yang di suplai. Apabila target lapak yang di suplai tidak terpenuhi, maka pabrik tidak akan mau membeli lapak tersebut.

### **c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat. Dikatakan berbasis masyarakat jika keputusan ditangan masyarakat secara keseluruhan dan tanggung jawab operasi dan pemeliharaannya ditangan masyarakat sesuai dengan kesepakatan. Pemeran utama dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya sebagai motivator dan fasilitator. Dalam hal ini prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menjadi hal krusial yang harus dijadikan sebagai dasar implementasi sebuah pengelolaan



berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam pengelolaan sampah.

Dalam implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat, masyarakat dituntut untuk aktif dalam hal pengelolaan sampah. Bentuk peran aktif masyarakat Desa Mulyoagung dalam program ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat Desa Mulyoagung ini dapat dilihat juga melalui kehadiran warga pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh fasilitator dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. Banyak warga Desa Mulyoagung yang mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan hal ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat sekitar Desa Mulyoagung dalam mendukung pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu. Partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam pembangunan TPST dapat dilihat dari kerja yang dilakukan oleh warga dalam membangun pagar dan akses jalan masuk ke TPST Mulyoagung Bersatu. Meskipun partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam perencanaan dan pembangunan TPST cukup tinggi, partisipasi dalam penyampaian aspirasi dan pendapat masih kurang. Padahal aspirasi masyarakat yang berupa saran pendapat maupun usulan-usulan sangat berguna bagi keberlanjutan dan pengembangan TPST Mulyoagung Bersatu. Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran serta masyarakat yang dimaksud dapat berupa:

- 1) Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- 2) Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- 3) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintahan kabupaten/kota.
- 4) Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat mempunyai peran sangat besar dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat. Partisipasi/peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu. Peran serta masyarakat Desa Mulyoagung dapat berupa pemberian saran dan pendapat dalam strategi pengelolaan sampah yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu kedepannya.

Selain partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh TPST Mulyoagung Bersatu adalah

dengan menggunakan tenaga kerja dalam pengelolaan sampah yang berasal dari masyarakat Desa Mulyoagung. sebagian besar yang menjadi pegawai di TPST Mulyoagung Bersatu adalah masyarakat Desa Mulyoagung dan beberapa ada yang dari desa lain dimana dulu menjadi ibu rumah tangga dan ada pula yang dulunya menjadi pemulung pada saat sampah masih dibuang di Daerah Aliran Sungai Brantas. Dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Mulyoagung. khususnya pegawai TPST Mulyoagung Bersatu dan juga rumah usaha warung yang ada di sekitar TPST.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program TPST**

### **3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu**

#### **a. Faktor Pendukung**

Geoege C. Edward III yang dikutip oleh Nawawi (2009) menyebutkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi atau sikap
- 4) Struktur birokrasi

TPST Mulyoagung Bersatu dalam pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat ini didukung oleh beberapa hal. Komunikasi dalam implementasi pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung ini cukup baik antara pihak swasta dan pengurus TPST dimana pihak swasta disini sebagai fasilitator

dan pembina sedangkan pelaksanaannya dijalankan dengan cukup baik oleh pegawai TPST. Dalam hal komunikasi antara masyarakat Desa Mulyoagung dan pengurus TPST Mulyoagung Bersatu cukup baik dalam hal partisipasi. Dari sumber daya dapat dilihat bahwa sarana yang dimiliki oleh TPST Mulyoagung Bersatu dalam pengangkutan, pemilahan, dan pengomposan sampah cukup lengkap. Dengan sarana dalam mengelola sampah yang memadai ini akan memudahkan TPST dalam proses pengelolaan sampah. Tetapi dalam hal pendanaan masih sangat kurang dikarenakan biaya pengeluaran TPST tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat oleh TPST Mulyoagung Bersatu. Perilaku pengurus KSM juga mempengaruhi perilaku para pegawai TPST dalam bekerja. Maka dengan upaya KSM menanamkan rasa kekeluargaan dan tanggungjawab yang tinggi kepada pegawai, membawa para pegawai untuk melakukan tugasnya dengan maksimal. Oleh sebab itu, dengan keberadaan KSM dan pegawai TPST yang berbasis partisipasi masyarakat lokal merupakan faktor pendukung dalam implementasi pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. Struktur Birokrasi yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah di atur dalam SOP TPST Mulyoagung Bersatu. Pegawai TPST Mulyoagung Bersatu melakukan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan SOP yang ada.

Selain itu, implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat juga didukung oleh komitmen KSM maupun pegawai TPST Mulyoagung Bersatu. Komitmen pegawai TPST Mulyoagung Bersatu dalam melakukan pengelolaan

sampah yang meliputi pengangkutan, pemilahan, dan pengomposan sampah merupakan faktor penting dalam keberhasilan TPST Mulyoagung Bersatu.

#### **b. Faktor Penghambat**

Kendala utama yang dialami oleh TPST Mulyoagung Bersatu dalam pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat adalah dalam pendanaan. Biaya operasional yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan akan menghambat operasional TPST dalam mengelola sampah. Selama ini penerimaan TPST adalah berasal dari iuran warga dan hasil penjualan lapak serta pupuk kompos. Penerimaan ini tidak cukup untuk menutupi biaya operasional yang tinggi. Pihak KSM TPST Mulyoagung Bersatu harus memiliki cara agar biaya operasional TPST tidak melebihi penerimaan. Manajemen keuangan yang baik perlu dilakukan. Selama ini solusi yang dilakukan oleh KSM TPST Mulyoagung Bersatu adalah dengan melakukan pinjaman ke rekanan. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya dengan meminjam ke rekanan ini akan terus berlanjut atau tidak. KSM TPST Mulyoagung Bersatu harus mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah pendanaan ini. Kendala lain yang dialami oleh TPST Mulyoagung Bersatu dalam mengelola sampah adalah kondisi sampah yang tercampur. Sampah yang tercampur ini akan membuat pemilahan sampah melakukan waktu yang cukup lama. Selain itu, kondisi sampah yang tercampur menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah yang dimulai sejak dari sumbernya masih rendah. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat

ini salah satunya adalah dengan memilah sampah sejak dikeluarkan dari rumah warga, maka hal ini merupakan sebuah dukungan dalam mensukseskan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat. Dalam pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat ini, masyarakat dalam artian setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya sejak dikeluarkan oleh masyarakat ini merupakan bentuk dukungan dan juga kewajiban masyarakat dalam mendukung implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat dan juga untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Terkait dengan kebijakan tentang pengelolaan sampah yang ada di Indonesia khususnya mengenai kebijakan yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan sampah di daerah, setiap orang wajib untuk melakukan pengelolaan sampah mulai dari pengurangan dan pemilahan sesuai jenis sampah perlu dipertanyakan apakah kebijakan seperti ini bisa secara efektif dilaksanakan. Dalam prakteknya dilapangan, kebijakan ini belum bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara efektif. Sampah yang dibuang oleh masyarakat Indonesia sebagian besar masih berupa sampah dalam kondisi tercampur, belum terpilah. Sebagai contoh, dalam implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sistem pengelolaan sampah yang digunakan adalah sistem pengelolaan sampah 3R dengan sampah tercampur. Artinya sampah yang diangkut untuk dibawa ke TPST

masih dalam keadaan tercampur. Sampah rumah tangga sebagai salah satu sumber sampah yang paling besar seharusnya dipilah terlebih dahulu sebelum diangkut ke TPST. Hal ini jika dilihat berdasarkan kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia seharusnya seperti itu. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang implementasi kebijakan PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu, program tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur. Program telah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Di Desa Mulyoagung sudah mempunyai pengelolaan sampah yaitu TPST Mulyoagung yang berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat disini adalah adanya keterlibatan masyarakat desa yakni dengan iuran yang sudah ditetapkan. Berdasarkan operasional pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh TPST Mulyoagung Bersatu tidak mengalami kendala. Kurangnya kesadaran petugas pemilah sampah yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu akan pentingnya kesehatan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hasil dari sampah organik yang telah dipilah perlu diperhatikan karena hal ini akan mempengaruhi kualitas pupuk kompos yang dihasilkan. Dalam aspek pendanaan, biaya operasional yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat dari hasil iuran warga dan penjualan lapak serta pupuk kompos menjadi kendala utama TPST dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat Desa

Mulyoagung dalam Program TPST 3R Berbasis Masyarakat sebelum proyek cukup tinggi. Akan tetapi dalam hal penyampaian aspirasi dan pendapat masih rendah. Masyarakat Desa Mulyoagung terkesan enggan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung ke TPST Mulyoagung Bersatu.

Implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu didukung oleh beberapa faktor. Pertama, dari sumber daya dapat dilihat bahwa sarana yang dimiliki oleh TPST Mulyoagung Bersatu dalam pengangkutan, pemilahan, dan pengomposan sampah cukup lengkap. Kedua, komitmen pegawai TPST Mulyoagung Bersatu dalam melakukan pengelolaan sampah yang meliputi pengangkutan, pemilahan, serta pengomposan sampah menjadi faktor penting dalam keberhasilan TPST Mulyoagung Bersatu dalam mengelola sampah yang ada di Desa Mulyoagung dan sekitarnya. Selain faktor pendukung, juga ada faktor yang menghambat implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu. Biaya operasional yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan menjadi kendala utama bagi TPST dalam mengelola sampah. Kendala lain yang ada adalah kondisi sampah dari rumah warga yang masih tercampur. Sampah yang tercampur ini akan membuat pemilahan sampah memakan waktu yang lama.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan dari hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Malang.

1. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam PP No 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga khususnya Pasal 11 agar ditinjau kembali apakah kebijakan tersebut bisa diimplementasikan dengan melihat situasi masyarakat saat ini. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban untuk kegiatan pengurangan sampah meliputi: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah dan masyarakat disini harus memilah sampah sejak dari sumbernya. Agar hal ini bisa diwujudkan, perlu adanya *reward* bagi masyarakat yang melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat mau memilah sampah sejak dari sumbernya dan mempunyai niat dari dalam dirinya untuk ikut serta dalam pengurangan sampah. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengelola sampah sejak dini dan bagaimana manfaat bagi lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi. Tidak hanya itu perlu adanya pendampingan kepada masyarakat sehingga tidak terkesan hanya bersifat sosialisasi saja, karena sosialisasi saja tidak cukup tanpa adanya pendampingan secara langsung kepada masyarakat.

Selain itu pemerintah harus tegas dalam menerapkan pengelolaan sampah yang sesuai pada undang-undang dan peraturan daerah maupun desa.

3. Sebaiknya pemerintah dan masyarakat tetap bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan TPST sebagai pengelolaan sampah terpadu yang baik. Serta kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan harus dipertahankan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul\_Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Muhammad. 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Genta Press
- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Basriyanta. 2007. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius
- Bahar, Yul H. 1986. *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: PT. Waca Utama Pramesti
- Chatarina Rusmiyati. 2011. *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS.
- Ekowati, 2005. *Perencanaan Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra SOLO
- Hamdi, Muchis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN

Nugroho, Panji. 2013. *Panduan Membuat Kompos Cair*. Jakarta: Pustaka Baru Press

Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta

Randy R Wrihatnolo dan Riant N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT.Gramedia.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

**Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader

Pemberdayaan Masyarakat.

